



# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KURSUS

DALAM PENYIAPAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
DI DUNIA KERJA



**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN  
KURSUS DALAM PENYIAPAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DI DUNIA KERJA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018**

# **Efektivitas Penyelenggaraan Kursus dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja**

## **Tim Penyusun :**

Dra. Josepha Maria Tedjawati Kristiani  
Lisna Sulinar Sari, S.Kom.  
Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D.  
Drs. Agus Amin Sulistiono, M.Pd.  
Dra. Yufriidawati, M.Si.

ISBN : 978-602-0792-10-1

## **Penyunting :**

Dra. Ida Kintamani Dewi Hermawan, M.Sc.  
Nur Berlian Venus Ali, M.SE  
Erni Hariyanti, S.Psi.

## **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, Desember 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspo

NIP 196710291993031002

## **KATA PENGANTAR**

Pengangguran masih menjadi salah satu masalah sosial di Indonesia. Jumlah pengangguran ini disebabkan di antaranya karena masih adanya angka putus sekolah yang cukup tinggi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meminimalisir jumlah pengangguran ini, pemerintah memberikan peningkatan keterampilan atau kecakapan hidup. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mencanangkan program keterampilan tersebut baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Menurut Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Oleh karenanya Kemdikbud telah memfasilitasi berbagai program keterampilan/kecakapan hidup yang meliputi penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Salah satu bentuk program keterampilan yang telah dikembangkan selama ini adalah melalui lembaga kursus dan pelatihan. Kursus dan keterampilan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat (warga belajar) yang menempuh

pendidikan nonformal akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan fungsional yang berguna dalam memasuki dunia kerja. Terkait dengan ketenagakerjaan, maka setelah warga belajar menamatkan pendidikannya, maka selayaknya mereka akan memiliki kompetensi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai pihak pengguna.

Berdasarkan urgensi perlunya kompetensi keterampilan warga belajar yang selaras dengan kebutuhan DUDI, maka Tim Puslitjakdikbud menganggap perlu untuk melakukan kajian Efektivitas Penyelenggaraan Kursus dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja. Kajian ini bertujuan memberikan usulan rekomendasi yang terkait dengan peningkatan mutu maupun relevansi penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kompetensi kerja dan kewirausahaan. Harapan besar Tim adalah agar hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait di lingkup Kemdikbud maupun masyarakat luas. Akhirnya, Tim menghaturkan pada semua pihak banyak terima kasih.

Jakarta, November 2017

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	3
C. Tujuan .....	6
D. Ruang lingkup .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Regulasi Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.....	8
2. Teori/Konseptual Kursus dan Pelatihan .....	14
3. Uji Kompetensi dan Kompetensi Kelulusan .....	18
4. Efektivitas Program Pendidikan Lembaga Kursus.....	23
5. Penyelenggaraan Program Keterampilan .....	25
6. Hasil Penelitian Terkait.....	34
7. Praktik Baik Lembaga Kursus dan Pelatihan .....	36
B. Kerangka Berpikir .....	38
BAB III METODOLOGI .....	42
A. Populasi dan Sampel Penelitian .....	42

B. Sumber Data.....	43
C. Pengumpulan Data .....	43
D. Pengolahan dan AnalisisData.....	43
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Kompetensi Lulusan.....	44
B. Pemanfaatan Bantuan Sarana .....	77
C. Manfaat Program PKK, PKW, dan Magang .....	88
BAB V SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN.....	107
A. Simpulan .....	107
B. Opsi Kebijakan.....	111
Daftar Pustaka .....	113



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2016, masyarakat Indonesia yang menganggur sebanyak 7.024.172 orang (BPS, 2016). Walaupun jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pengangguran masih merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang segera dituntaskan. Lebih lanjut, dari jumlah pengangguran tersebut, sebagian besar merupakan anggota masyarakat yang berpendidikan SLTA/SMU/SMK, yakni sebesar 1.546.699 orang. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Indonesia mengingat pada tahun 2020 Indonesia mulai mendapatkan “bonus demografi”, sehingga komposisi penduduk Indonesia lebih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-34 tahun).

Terjadinya pengangguran pada sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu faktor penyebabnya dikarenakan oleh masih minimnya tingkat pendidikan. Rata-rata lama pendidikan di Indonesia mencapai 8,01 tahun. Artinya, rata-rata masyarakat Indonesia berpendidikan setingkat SMP. Pada tahun 2014, secara rinci tingkat pendidikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai berikut: a) 70 persen menamatkan pendidikan jenjang pendidikan dasar; b) 22,40 persen menamatkan pendidikan menengah, dan c) 7,20 persen menamatkan perguruan tinggi. Selain itu, masih terdapat adanya kelompok usia sekolah yang putus sekolah. Berdasarkan data Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2012-2015, jumlah putus sekolah paling banyak ditemui pada jenjang SD. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Putus Sekolah Tahun 2012 - 2015

Tahun	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
2012/2013	352.673	134.824	42.471	124.791	654.759
2013/2014	294.045	137.436	42.008	129.037	602.526
2014/2015	176.909	85.000	68.219	86.292	416.420
	823.627	357.260	152.698	340.120	1.673.705

Sumber : PDSPK Kemendikbud 2012-2015

Pengangguran menyebabkan melemahnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi kemiskinan. Pada periode Maret-September 2016, persentase kemiskinan menurun. Namun, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta menjadi 10,49 juta orang). Sementara itu, di daerah pedesaan terlihat turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta menjadi 17,28 juta orang). Rendahnya tingkat pendidikan dan masih adanya anak putus sekolah dapat mengakibatkan menurunnya kualitas manusia Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing maka permasalahan kemiskinan dan pengangguran perlu diatasi segera. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memberikan keterampilan atau kecakapan hidup bagi kelompok masyarakat miskin maupun yang belum memiliki pekerjaan.

Keterampilan/kecakapan hidup ini dapat diberikan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Menurut Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 26, angka (2) dinyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta

pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Republik Indonesia, 2003). Di antara lembaga pendidikan nonformal yang memberikan keterampilan/kecakapan hidup yaitu lembaga kursus dan keterampilan (LKP) dan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, Pasal 26, angka (5), dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Lebih lanjut, Pasal 103, angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dikatakan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus (Republik Indonesia, 2010).

## **B. Permasalahan Penelitian**

Pemberian keterampilan/kecakapan bagi peserta didik merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak diharapkan memiliki inisiatif tinggi, keunggulan, keberanian mengambil langkah, ketekunan sikap mental, mampu melihat dan menciptakan peluang dan perilaku gigih serta berjiwa mandiri. Oleh karenanya pemerintah memfasilitasi berbagai program keterampilan/kecakapan hidup meliputi penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Bentuk program yang telah dikembangkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan ada lima, yaitu Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Pendidikan Kecakapan

Kerja (PKK), magang, implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan bantuan sarana.

Penjelasan masing-masing bentuk bantuan disajikan berikut ini. PKW merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. PKK merupakan program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Magang merupakan program yang diberikan kepada warga masyarakat atau warga belajar, bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang siap kerja. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan akademis melainkan juga dilengkapi dengan keahlian fungsional yang diperlukan di dunia kerja. Program PKW, PKK, dan Magang dilakukan berbasis pada SKL dan menggunakan acuan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Selanjutnya, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan warga belajar kursus pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi warga belajar mandiri serta sebagai pedoman dalam menyusun, merevisi, dan/atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang digunakan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Bantuan sarana merupakan program pemberian bantuan seperangkat

sarana/peralatan pembelajaran dari Pemerintah Pusat untuk menunjang kegiatan pembelajaran praktik dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai kebutuhan DU/DI.

Masalah yang muncul dalam implementasi program tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek masukan penyelenggaraan kursus dan pelatihan, terdapat berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: i) Apakah warga belajar setelah mengikuti kursus dan pelatihan memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kriteria kompetensi yang disyaratkan dalam program kursus dan pelatihan; ii) Apakah warga belajar yang telah lulus dapat bekerja sesuai dengan tuntutan DUDI dan dapat mengatasi tantangan dan masalah dalam berwirausaha (mendirikan usaha mandiri)?; iii) Apakah warga belajar kursus memiliki pola pikir (*mindset*) dan sikap untuk mengembangkan potensi berwirausaha; iv) Apakah warga belajar yang telah mengikuti program magang dapat menerapkan keahlian dibidang keterampilan produksi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; v) Apakah instruktur/tutor sudah memiliki standar kompetensi yang ditetapkan pada setiap program yang diselenggarakan di lembaga kursus dan pelatihan?; dan vi) Apakah penyelenggara kursus dan pelatihan dalam menyelenggarakan berbagai jenis program kursus lebih disebabkan karena adanya bantuan sarana Pemerintah, tanpa mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat sekitar?

Mengacu pada identifikasi masalah maka pertanyaan penelitian dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan uji kompetensi dan capaian kompetensi lulusan warga belajar?

2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program PKK, PKW, dan program magang
3. Bagaimana efektivitas pemanfaatan bantuan sarana prasarana di lembaga kursus dan pelatihan?

### **C. Tujuan**

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberikan usulan rekomendasi yang terkait dengan peningkatan mutu serta relevansi penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kompetensi kerja dan kewirausahaanwarga belajar. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengkaji penyelenggaraan uji kompetensi dan capaian kompetensi lulusan.
2. Mengkaji efektivitas penyelenggaraan program PKK, PKW, dan program magang
3. Mengkaji efektivitas pemanfaatan bantuan sarana prasarana di lembaga kursus dan pelatihan.

### **D. Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut.

1. Aspek sasaran program, meliputi program PKK, program PKW, program magang, dan program bantuan sarana prasarana.
2. Aspek penyelenggara program, yaitu lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program PKK, program PKW, program magang, dan program bantuan saranaprasarana tahun anggaran 2015 dan 2016.

3. Aspek jenis keterampilan, yaitu keterampilan yang banyak diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, meliputi keterampilan program: 1) PKK (kursus tata busana, kursus tata rias pengantin; 2) PKM (tata busana); dan 3) Magang (menjahit garmen).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Regulasi Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan mengacu pada:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pada pasal 1 dinyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selanjutnya, pada pasal 3 dinyatakan bahwa setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70, Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri. Lebih lanjut, Pasal 1 dalam Permendiknas Nomor 70, Tahun 2008 dinyatakan bahwa: (i) Organisasi profesi atau asosiasi profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh

anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukareka atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan, atau kompetensi anggotanya dan warga masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; (ii) Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu; (iii) Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian; (iv) Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional; (v) Lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri; dan (vi) Tempat uji kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. Selanjutnya, uji

kompetensi yang bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah agar peserta kursus dan pelatihan dapat memiliki kemampuan untuk bersaing dalam pekerjaan di dunia usaha dan atau menciptakan pekerjaan baru.

- c. Permendiknas Nomor 41, Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.

Pasal 1 dalam Permendiknas Nomor 41, Tahun 2009, disebutkan bahwa pembimbing pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar pembimbing pada kursus dan pelatihan yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan sesuai dengan fungsi kursus dan pelatihan, yaitu:
  - a) Pembimbing kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan keilmuan (akademik) dan/atau keahlian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - i. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan;
    - ii. Memiliki sertifikat kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan; dan

- iii. Memiliki pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang keahlian pada kursus dan pelatihan yang relevan.
- 2) Pembimbing kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan praktis, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. Memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C;
  - ii. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai pembimbing pada kursus dan pelatihan; dan
  - iii. Memiliki pengalaman kerja pada bidangnya minimal tiga tahun.
- 3) Standar kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja pembimbing pada kursus dan pelatihan.
- d. Permendiknas Nomor 42, Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus

Dalam Permendiknas Nomor 42, Tahun 2009 menetapkan bahwa pengelola kursus wajib memenuhi standar pengelola kursus yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengelola kursus sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Akademik Pengelola Kursus dan Pelatihan.
  - a) Memiliki pendidikan tingkat SMA/MA/SMK atau yang sederajat, dan memiliki pengalaman

bekerja di lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- b) Memiliki sertifikat pengelola kursus dan pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## 2) Kompetensi Pengelola Kursus dan Pelatihan.

Standar kompetensi pengelola kursus dan pelatihan ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja pengelola pada kursus dan pelatihan. Selanjutnya, secara rinci masing-masing kompetensi diuraikan sebagai berikut.

### a) Kompetensi kepribadian

- i. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, berakhlak mulia, dan bertindak konsisten; dan
- ii. Memiliki komitmen terhadap tugas.

### b) Kompetensi manajerial

- i. Merencanakan program kursus dan pelatihan;
- ii. Mengorganisasikan program kursus dan pelatihan;
- iii. Melaksanakan program kursus dan pelatihan;
- iv. Mensupervisi pendidik dan tenaga kependidikan program kursus; dan

- v. Mengevaluasi program kursus dan pelatihan.
- c) Kompetensi kewirausahaan
  - i. Memanfaatkan peluang dan mengantisipasi risiko;
  - ii. Mengembangkan program, menciptakan inovasi dan menyusun rencana usaha; dan
  - iii. Membangun citra lembaga kursus dan pelatihan.
- d) Kompetensi sosial
  - i. Bekerjasama dalam pelaksanaan tugas; dan
  - ii. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 26, Tahun 2016 tentang Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi. Lebih lanjut, Permendikbud Nomor 26, Tahun 2016, Pasal 1 menetapkan tentang:
  - 1) Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - 2) Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan bertujuan untuk menunjang kelancaran pemenuhan standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan dalam rangka memberikan layanan prima bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing.

- 3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi lima jenis keterampilan yang terdiri atas: a) bahasa; b) fotografi; c) merangkai bunga kering dan bunga buatan; d) pijat pengobatan refleksi; dan e) teknis akuntansi.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa kesemuanya legal formal tersebut dimaksudkan untuk penjaminan mutu pelaksanaan kursus dan pelatihan terkait dengan standar instruktur, pembimbing sarana dan prasarana, uji kompetensi, dan standar kompetensi (kepribadian, manajerial, kewira-usahaan, dan sisal) serta kompetensi lulusan.

## **2. Teori/Konseptual Kursus dan Pelatihan**

Menurut Gressner (dalam Ricad, 2013: 19) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kursus yaitu “kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan dengan sengaja, teroganisir, dan sistematis untuk memberikan satu mata pelajaran atau rangkaian pelajaran tertentu dalam waktu yang relatif singkat, agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya dan masyarakat”. Dengan demikian, kursus ini dibangun dan diselenggarakan sejajar dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menambah keterampilan, usaha sosial ekonomi, pengisi waktu luang, ataupun upaya pengembangan diri seseorang.

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal

mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi warga belajar yang ingin mengembangkan keterampilan pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak ditempuh pada jalur pendidikan formal.

Adapun sasaran kursus antara lain disajikan seperti berikut ini.

- a. Warga masyarakat yang sudah mengikuti program pendidikan nonformal yang masih memerlukan pendidikan tambahan;
- b. Warga masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat pendidikan formal tertentu masih menganggap perlu memperoleh pendidikan berkelanjutan yang bersifat khusus;
- c. Warga masyarakat yang sudah memiliki sumber nafkah tetapi masih ingin menambah atau memperdalam pendidikannya untuk meningkatkan penghasilan atau kemampuan kerjanya; dan
- d. Warga masyarakat yang masih ingin mendapatkan pendidikan untuk mengisi dan atau mengembangkan kepribadiannya, serta mengisi waktu senggang.

Terkait dengan pelatihan, Nasution dalam Fuad Adman (Puslitjardiknas, 2013), berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu proses belajar-mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang. Tujuan pelatihan yakni untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu Veithzal Rivai dalam Fuad Adman (Puslitjardiknas, 2013) menyatakan bahwa pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah

laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaan.

Dalam pelatihan pada prinsipnya merupakan kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktik, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta bermanfaat bagi peserta pelatihan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan, diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum, ada tiga tahap dalam pelatihan, yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan, dan tahap evaluasi. Dengan istilah lain, ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan, dan fase pasca pelatihan.

Kegiatan pelatihan sangat penting karena bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau keterampilan terutama bagi yang mempersiapkan diri memasuki lapangan pekerjaan. Adapun bagi yang sudah bekerja berfungsi sebagai “*charger*” agar kemampuannya kapabilitas selalu terjaga guna mengamankan eksistensi atau peningkatan karir. Dengan kata lain, pelatihan bagi pekerja dimaksudkan untuk *up-grading* kompetensi sesuai dengan tingkat jabatannya. Lebih lanjut, pandangan Irianto (dalam Ricad, 2013: 26-27) pelatihan yang dilakukan perusahaan memiliki beberapa manfaat bagi karyawan, antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar;
- b. Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru;
- c. Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas;
- d. Memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran;
- e. Menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut; dan
- f. Mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para pekerja wanita.

Di lingkungan Kemendikbud, salah satu penyelenggara pendidikan nonformal adalah lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Ada dua tipologi jenis kursus dan pelatihan, yang banyak dilakukan. Pertama, Kursus terstruktur, berjenjang, dan bersertifikasi, memiliki surat izin operasional dan mengacu pada standar nasional, berbasis kelembagaan yang banyak diselenggarakan oleh LKP yang ada di Indonesia meliputi: Kursus komputer, elektronika, menjahit, tata kecantikan rambut (TKR), tata kecantikan kulit (TKK), tata rias pengantin (TRP), otomotif, akuntansi, desain, konstruksi, bordir, bahasa, SPA, perhotelan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kedua, Kursus tidak terstruktur dan tidak harus bersertifikasi, boleh tidak memiliki surat izin operasional, dapat membuat acuan sendiri, dan berbasis

kebutuhan masyarakat. Kursus tidak terstruktur tersebut antara lain: kursus ternak ayam, ternak itik, memiliki kambing, memiliki belut, budi daya tanaman hias, pembibitan jamur, kerajinan tanah liat, menyulam, membuat anyaman bambu, dan sebagainya.

Idealnya program LKP harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu pembelajaran warga belajar sehingga sesuai kebutuhan pasar kerja, maka dibutuhkan:

- a. SKKNI sebagai standar kompetensi kerja.
- b. SKL sebagai acuan kursus dan pelatihan yang relevan dengan SKKNI.
- c. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai acuan pembelajaran.
- d. Bahan ajar cetak dan elektronik untuk memudahkan dalam pembelajaran.

### **3. Uji Kompetensi dan Kompetensi Kelulusan**

Kompetensi dimaknai sebagai kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik (Ainunjariah, 2013). Adapun standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Pelaksanaan uji kompetensi warga belajar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sebagaimana diberlakukan bagi peserta didik pendidikan formal.

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada

suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Dalam kegiatan kursus dan pelatihan, penyelenggara kursus melakukan uji kompetensi kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi pekerjaan tertentu seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 (Pasal 61, ayat 3) (Republik Indonesia, 2003). Uji kompetensi kursus dilakukan dengan tujuan untuk: (i) menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik dan warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan; dan (ii) memfasilitasi peserta didik dan masyarakat yang ingin mengikuti uji kompetensi berstandar nasional.

Kompetensi kursus diujikan oleh tiga penyelenggara, yaitu penyelenggara kursus, penguji dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), dan penguji dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Uji kompetensi LKP dilaksanakan oleh penyelenggara kursus di lembaga kursus.

Setiap warga belajar kursus diwajibkan mengikuti uji kompetensi LKP sehingga memiliki sertifikat lulusan yang digunakan untuk bekerja. Selain itu, LKP dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Oleh karenanya LKP harus menyediakan pendidik dan pengujinya, prasarana dan sarana, serta pembelajarannya. Setelah lulus dari LKP, penyelenggara LKP mengarahkan kepada warga belajar untuk mengikuti ujian kompetensi Negara guna mendapatkan sertifikat dari LSK.

Uji kompetensi LSK dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) dengan penguji LSK yang telah ditunjuk oleh LSK. LSK didirikan oleh asosiasi/ organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra Pendidikan Non-Formal Informal (PNFI) dan keberadaannya diakui oleh Direktorat Jenderal PNFI,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LSK ini merupakan lembaga independen yang berhak melakukan uji kompetensi.

Sementara, uji kompetensi LSP harus dilakukan di TUK yang telah ditunjuk oleh LSP. TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP, 2014). Ada tiga jenis TUK meliputi: (i) TUK di tempat kerja, yaitu TUK yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan; (ii) TUK sewaktu, yaitu TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidental; dan (iii) TUK mandiri, yaitu TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. TUK ini telah diverifikasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai tempat uji kompetensi, sehingga uji kompetensi ini tidak dapat dilakukan disembarang tempat. LSP ini merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari BNSP. Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dinyatakan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.” Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lebih rinci lagi standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik/warga belajar yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas dan/atau semester/ketetapan pembagian waktu belajar pada suatu mata pelajaran. Adapun Kompetensi Dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran (Anonim, 2009).

Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian.

Standar kompetensi lulusan (SKL) berfungsi sebagai:

- a. Kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan;
- b. Rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain; dan
- c. Arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi:

- 1) SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Mulyasa, 2010: 27).
  - 2) SKL pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
  - 3) SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan (Mulyasa, 2010: 91).
- d. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

SKL terbagi menjadi tiga, yaitu SKL satuan pendidikan, SKL kelompok mata pelajaran, dan SKL mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya, lihat uraian berikut ini.

Pelaksanaan Uji Kompetensi di LPK

Berbagai SKL satuan pendidikan meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) meliputi:

- 1) SD/MI/SDLB/Paket A;
- 2) SMP/MTs./SMPLB/Paket B;
- 3) SMA/MA/SMALB/Paket C;

4) SMK/MAK

b. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran:

- 1) Agama dan Akhlak Mulia;
- 2) Kewarganegaraan dan Kepribadian;
- 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Estetika;
- 5) Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

c. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran

Standar kompetensi mata pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan setiap mata pelajaran yang didapat pada peserta didik sesuai satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar maupun menengah.

**4. Efektivitas Program Pendidikan Lembaga Kursus**

Subagyo dalam Budiani (2009) tentang Teori Efektivitas (2015), menyatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Steer (2013), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam Budiani (2009) sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Standar Pengukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 - 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Di atas 80	Sangat Efektif

Sumber : Litbang Depdagri, 1991 dalam Budiani 2009

Efektivitas program penanggulangan pengangguran ini dapat dilihat dari variabel ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan. Menghitung efektivitas program menggunakan statistik sederhana (Sugiyono, dalam Budiani, 2009), yaitu:

$$\text{Efektivitas program} = R/T \times 100\%$$

Dimana: R = Realisasi kegiatan  
T = Target kegiatan

Para pakar lainnya berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan; Bungkaes dalam Teori Efektivitas (2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya 1). ada efeknya (pengaruhnya) seperti manjur, mujarab, mempan; dan 2). penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas, sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal.

Menurut Gibson et.al. dalam Bungkaes (2013) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat dengan prestasi yang diharapkan (standar), makin lebih efektif. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis, yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

## **5. Penyelenggaraan Program Keterampilan**

Berbagai jenis program-program pokok keterampilan yang saat ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, meliputi:

### **a. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)**

PKK merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan berbasis keterampilan kerja sesuai kebutuhan DUDI. Program PKK diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang keterampilan sesuai kebutuhan DUDI, sehingga dapat memanfaatkan secara optimal peluang-peluang kerja yang terbuka pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Program PKK merupakan salah satu wujud program penyalarsan kursus dan pelatihan dengan kebutuhan kompetensi kerja pada DUDI dan kewirausahaan. Melalui program ini, warga belajar dibekali keterampilan sesuai kebutuhan DUDI dan dikembangkan pengembangan etos kerja. Setelah menyelesaikan program, warga belajar dibantu dan dibimbing oleh lembaga penyelenggara program

untuk mengakses lapangan kerja yang tersedia sampai mereka mendapatkan pekerjaan di DUDI.

Oleh karena itu, Program PKK bertujuan untuk: i) memberikan bekal keterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena belum memiliki keterampilan; ii) mendorong lembaga kursus dan pelatihan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan DUDI; dan iii) mendukung kebijakan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam upaya menyiapkan warga belajar kursus dan pelatihan menjadi tenaga kerja baru yang terampil/kompeten dan memiliki etos kerjaserta daya saing tinggi, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) tahun 2017 memberikan bantuan untuk penyelenggaraan program PKK. Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan program PKK dapat diakses oleh lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknisnya.

#### **b. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)**

PKW adalah program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Program PKW diselenggarakan melalui pendekatan “4in1”, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi peluang usaha, dilakukan dengan mengidentifikasi 1) peluang usaha baik pada skala lokal, nasional, dan internasional; dan 2) potensi sumberdaya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai peluang pasar pada skala lokal, nasional, atau internasional;.
- 2) Pembelajaran kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan berwirausaha;
- 3) Evaluasi hasil pembelajaran; dan
- 4) Pendampingan dan perintisan usaha.

Program PKW bertujuan untuk memberikan: 1) bekal pengetahuan kewirausahaan kepada warga belajar; 2) bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada warga belajar; 3) pola pikir (*mindset*) dan sikap berwirausaha kepada peserta didik; dan 4) dorongan untuk menciptakan rintisan usaha baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh DUDI, mitra usaha, dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

### **c. Program Magang**

Magang merupakan sebuah sarana untuk warga belajar dalam menambah ilmu pengetahuan serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dengan cara menerapkan secara langsung ke dunia kerja di perusahaan atau di instansi tertentu.

Program magang merupakan suatu kegiatan belajar sambil melakukan (*learning by doing*) dalam rangka pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi warga belajar. Program magang juga memberikan pengalaman awal untuk membangun jati diri pendidik/

instruktur dalam memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang tertentu, memantapkan kemampuan awal siswa atau mahasiswa. Selain itu, program magang merupakan suatu kegiatan akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah/di tempat kursus.

Menurut Sudjana (2000: 16), magang merupakan salah satu unsur belajar tertua di dunia yang sampai era informasi ini masih tetap bertahan keberadaannya. Magang diperlukan keberadaannya sebagai metode pembelajaran individual dalam penyebaran dan penerimaan informasi yang dapat dilakukan oleh semua tingkatan manusia dari tingkat kehidupan sederhana sampai dengan tingkat kehidupan modern. Pada masyarakat sederhana, zaman peradaban kuno, masyarakat pada umumnya tidak mengenal aksara dan angka, sehingga informasi pengetahuan dan keterampilan, kerajinan tangan, pertukangan dan pertanian, disebarkan oleh penduduk melalui hubungan langsung. Hubungan langsung antara seorang dengan orang lain dalam penyampaian dan penerimaan informasi disebut dengan istilah magang. Dalam magang, interaksi pembelajaran terjadi melalui komunikasi antar pesonal secara langsung, antara pemberi dan penerima pesan. Bagi yang memberikan informasi adalah membelajarkan, sementara bagi yang menerima informasi adalah belajar. Pembelajaran magang dikatakan berhasil apabila permagang (pendidik) mampu menyadarkan pemagang (peserta didik/warga belajar) untuk mampu melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Lebih lanjut Sudjana (2000), mengemukakan bahwa melalui magang seseorang yang memiliki pengalaman tertentu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia miliki kepada orang lain

yang belum berpengalaman dan yang lebih dahulu memiliki pengalaman dan keahlian tertentu, sehingga setelah menerima pengetahuan dan keterampilan tersebut pemegang mampu melakukannya sendiri.

Menurut Raharjo (1989:17), unsur utama dari belajar dengan cara magang ini adalah meniru. Hasil belajar dengan bekerja itu merupakan ukuran keberhasilan dari magang. Magang dapat dianggap telah selesai manakala pemegang itu telah dapat menyelesaikan hasil belajar secara sendiri dengan hasil yang persis/sama dengan yang dibuat (dihasilkan) oleh sumber belajar dalam waktu yang sama atau lebih cepat dari pada waktu yang digunakan sumber belajar.

BPKB Jayagiri (1990:3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan magang yaitu, proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa magang adalah kegiatan belajar sambil melakukan (*learning by doing*) antara pendidik (permagang) dan peserta didik (pemegang) melalui komunikasi langsung dalam rangka pembentukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan memantapkan kemampuan awal pemegang untuk mampu melakukan kegiatan belajar secara mandiri, serta memberikan pengalaman awal untuk membangun jati diri pendidik dan peserta didik yang lebih memfokuskan pada bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah dan/atau di lembaga kursus dan pelatihan.

Prinsip magang yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep magang yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil, kompeten dan produktif, khususnya konsep magang secara tradisional

(*grassroot*) yang banyak terjadi pada perusahaan industri kecil. Target dalam latihan pemagangan menurut pola Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepnakertrans) adalah peserta yang telah menyelesaikan minimal SMP dan tidak mampu melanjutkan pendidikan formal, mereka dapat mengikuti latihan pemagangan bidang tertentu sesuai dengan profesi yang dikehendaki (bakat dan minatnya). Kemampuan yang menjadi sasarannya yaitu tenaga terampil dan kompeten, yang bisa dicapai dalam waktu sekitar tiga tahun. Target yang lebih tinggi sekitar 3,5 tahun yang ditambah dengan kursus manajerial, yaitu menjadi tenaga pengelola atau manajer menengah. Beberapa tujuan dari penyelenggaraan program magang, antara lain untuk:

- 1) Mengembangkan cara berpikir siswa/mahasiswa agar bisa lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan dirinya.
- 2) Mengubah pola pikir siswa/mahasiswa tentang lingkungan kerja yang sebenarnya.
- 3) Lebih memahami tujuan penerapan ilmu yang dimiliki.
- 4) Lebih dapat memahami konsep-konsep nonakademis di dunia kerja nyata.
- 5) Memperoleh peluang untuk dapat kerja di instansi/perusahaan tempat magang, setelah lulus sekolah.
- 6) Memperoleh wawasan tentang dunia nyata dan membandingkan antara teori dengan praktek (<http://lp31.unikama.ac.id/id/2015/05/09/mengapa-ppl-berubah-menjadi-magang/>)

Manfaat dari magang tidak hanya bagi peserta didik/warga belajar yang melakukan magang melainkan juga institusi pendidikan. Manfaat magang yang diperoleh bagi peserta didik/warga belajar adalah dapat menambah pengalaman dalam hal kerja yang belum tentu bisa didapatkan ketika belajar di tempat magang. Magang juga melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa dan siswa/pembelajar dalam dunia kerja. Secara tidak langsung, pembelajar/siswa atau mahasiswa yang melakukan magang juga telah mempelajari sistem yang berlaku dalam dunia kerja tersebut.

Bagi institusi pendidikan yang bersangkutan, magang membawa manfaat dalam terwujudnya visi misi perguruan tinggi atau sekolah dan/atau lembaga kursus dan pelatihan untuk menciptakan mahasiswa atau siswa/pembelajar yang memiliki kemampuan siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, magang juga bisa menjadi tolak ukur bagi perguruan tinggi atau sekolah/lembaga kursus dan pelatihan dalam menilai kesiapan peserta didik/warga belajarnya. Hal tersebut, bisa dijadikan sebagai evaluasi dalam bidang akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan/kursus dan pelatihan. Sementara itu, bagi pihak perusahaan yang menjadi tempat magang, keberadaan magang dapat membantu dalam melancarkan kegiatan operasional perusahaan. Artinya, dengan adanya kegiatan magang, semua pihak mendapatkan keuntungan (tempat magang Yogyakarta, 2016).

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga dan Kelembagaan PNF melalui penyiapan kebijakan prosedur, norma, acuan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan

kursus dan kelembagaan. Selain melakukan pembinaan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga memberikan bantuan program agar kursus dapat diselenggarakan dengan baik. Bantuan tersebut dapat berupa pelatihan, bantuan sarana prasana, atau magang.

Dalam kajian ini ada empat program bantuan dari pemerintah yang menjadi fokus yaitu program PKK, PKW/PKM, program bantuan sarana, dan program magang. Bantuan tersebut digulirkan dengan tujuan yang terdapat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2** Tujuan Program PKK, PKW/PKM, Magang, dan Bantuan Sarana Prasarana

No	Program	Tujuan
1.	PKK	Memberikan bekal keterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena belum memiliki keterampilan
2.	PKW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan kepada peserta didik.</li> <li>2. Memberikan bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik.</li> <li>3. Menanamkan pola pikir (<i>mindset</i>) dan sikap berwirausaha kepada peserta didik.</li> <li>4. Mendorong dan menciptakan rintisan usaha baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri, mitra usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.</li> </ol>
3.	Magang	Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui kegiatan belajar dan bekerja dibidang keterampilan produksi

No	Program	Tujuan
		barang/jasa sesuai dengan kebutuhan DUDI yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing daerah.
4.	Bantuan sarana	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran baik teori maupun praktik pada lembaga kursus dan pelatihan sehingga proses pembelajarannya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten.

Sumber: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016.

#### **d. Program Pemberian Bantuan Sarana Prasarana**

Program bantuan sarana dan prasarana pembelajarankursus dan pelatihan adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan berupa sarana dan prasarana pembelajaran teori dan/atau praktik untuk mendukung pembelajaran. Pemberian bantuan sarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran baik teori maupun praktik pada lembaga kursus dan pelatihan sehingga proses pembelajarannya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten. Lebih lanjut, program bantuan sarana prasarana tersebut diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan dengan maksud agar penyelenggara kursus untuk: 1) melengkapi sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya; dan 2) menstimulasi lembaga kursus dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga lulusannya menjadi lebih kompeten.

Pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana bagi lembaga kursus dan pelatihan dengan kriteria meliputi: 1) memiliki nomor induk lembaga kursus dan pelatihan (Nilek) yang sudah divalidasi (lampirkan *print out* Nilek Online); 2) memiliki izin operasional yang masih aktif sesuai dengan jenis keterampilan yang diajukan dan sudah beroperasi minimal lima tahun; 3) memiliki nomor rekening atas nama LKP; 4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; dan 5) mengirimkan proposal sesuai dengan juknis tahun 2016 dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota (surat rekomendasi aslinya dilampirkan).

## **6. Hasil Penelitian Terkait**

Pada tahun 2010 Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi telah melakukan kerjasama dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam kajian tentang pendidikan kewirausahaan pada pendidikan dasar dan menengah. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan memberikan beberapa aspek pendidikan, yaitu: sikap/perilaku/karakter, keterampilan, dan pengetahuan (Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Dikbud bekerjasama dengan Kemitraan Australia Indonesia (Puslitjaknov), 2010: 184). Dalam kajian tersebut, dikemukakan bahwa aspek sikap/perilaku/karakter adalah aspek yang sangat penting bagi kesuksesan seorang entrepreneur/wirauasaha. Sikap gigih, pantang menyerah, dan sejenisnya tidak bisa dibentuk dalam jangka pendek. Kualitas sikap, perilaku, dan karakter unggul ini harus dibentuk sejak anak usia dini. Dampak pendidikan kewirausahaan terhadap peserta didik/warga belajar adalah anak dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang memadai, peserta

didik akan mampu melihat peluang dan berani mengambil peluang tersebut, dan merealisasikannya menjadi suatu usaha bisnis. Lebih lanjut, wirausaha berbasis peluang ini akan mampu menumbuhkan kembangkan bisnisnya yang menawarkan nilai lebih dan berkontribusi lebih besar bagi pemilik, karyawan, dan masyarakat sekitarnya. Kewirausahaan semacam inilah yang akan mampu menyumbangkan secara signifikan bagi pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Dari segi materi pembelajaran, kajian Puslitjaknov tersebut mengemukakan bahwa materi kewirausahaan untuk anak SD dan SMP lebih diberikan dalam bentuk penanaman sikap dan pengetahuan, dan sedikit latihan keterampilan wirausaha seperti koperasi, dan *market day*, sedangkan pada level SMA-SMK selain pengetahuan dan sikap, juga pada pengembangan keterampilan khususnya keterampilan berbisnis, dan porsi yang paling besar untuk aspek skill kewirausahaan adalah pada SMK.

Ditinjau dari keikutsertaan warga belajar ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Nurhandoko (2009:91), bahwa antusiasme warga belajar yang mengikuti kursus komputer sangat membantu proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, hubungan antara tutor dan warga belajar sangat harmonis. Pembelajaran ini diikuti oleh warga belajar yang telah lulus dari SMA, sikap yang ditunjukkan warga belajar sangat baik. Selain itu, adanya respon balik dari masyarakat yang bersifat positif manakala mengetahui anak mereka mempunyai kesulitan dalam belajar, kemudian memberikan nasihat kepada anak mereka agar belajar lebih giat lagi.

Pendampingan dalam pelaksanaan program kursus sangat penting agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan memiliki kemampuan dalam bekerja di dunia kerja ataupun membangun wirausaha sendiri. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud (2014: 148-149), ditemukan bahwa pendampingan sepenuhnya melaksanakan aspek pendampingan dengan baik, antara lain: (i) tidak adanya kriteria dalam penetapan pendamping yang berasal dari penyelenggara kursus maupun dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan; (ii) pendamping belum pernah mengikuti pelatihan menjadi pendamping dalam perintisan usaha; (iii) bentuk pendampingan dengan peserta didik sebatas perkataan atau nasihat, dan belum dalam tindakan dengan cara memperkenalkan peserta kepada pengusaha atau perusahaan lain yang sudah berkembang.

## **7. Praktik Baik Lembaga Kursus dan Pelatihan**

LKP Navita adalah lembaga dengan bidang keterampilan jahit dan bordir yang terdapat di Yogyakarta. LKP Navita ini didirikan bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan usaha mandiri. Program ini diarahkan untuk layanan kepada masyarakat usia produktif terutama bagi mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya.

Visi LKP Navita adalah menjadi lembaga pilihan dan kepercayaan masyarakat yang menghasilkan lulusan berkemampuan unggul berstandar nasional. Misi LKP Navita adalah mengentaskan pengangguran dan memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan kursus dan pelatihan

serta pemberdayaan usaha mandiri. Profil LKP Navita secara rinci disajikan berikut ini.

Struktur organisasi LKP Navita terdiri atas

Pemilik : Agung Guntoro

Penanggungjawab Lembaga : Sri Isbiyani

Tenaga Pelatih dan Pendidik: Sri Isbiyani,  
Siti Mulyani,  
Tri Wahyuni

Sekretaris dan Bendahara : Hanif Abdan Syakuro

Selanjutnya, jenis-jenis kursus Kursus di LPK Navita terdiri atas:

LPK ini menyelenggarakan kursus “menjahit” dari tingkat dasar, terampil, mahir. Selain itu, kursus bordir tingkat dasar, terampil. Lebih lanjut, selain kursus jahit dan bordir juga dibuka kursus untuk menunjang kelengkapannya, yaitu a) Sulam pita; b) Payet; c) Smook; d) Rajut; e) Aneka ragam kain flannel; f) Batik; g) Desain mode; dan h) Aneka aplikasi kain perca.

Perencanaan pembelajaran program jahit dan bordir baik tingkat dasar, terampil, maupun mahir masing-masing diselesaikan dalam 24 pertemuan dengan ketentuan sekali pertemuan dua jam. Dengan rincian  $24 \times 2 \text{ jam} = 48 \text{ jam}$ . Seminggu 2x pertemuan selama 3 bulan, untuk program lainnya berdasarkan jumlah siswa, waktu dan tempat bisa dikompromikan.

LKP Navita membuka peluang kemitraan dengan dunia industri khususnya: garmen, konveksi, maupun modiste

untuk bisa menempatkan anak didiknya bekerja sesudah selesai dari kursus. Mitra kerja LKP tidak hanya menyalurkan lulusan melainkan juga dalam perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. Produk yang dihasilkan oleh LKP Navita meliputi: a) Cempal, b) Sarung tangan, c) Bantal bayi, d) Guling bayi, e) Blouse, f) Hem, g) Seragam sekolah, dan h) Seragam kantor, dan lain-lain.

Dari contoh praktik baik tersebut dapat diambil simpulan bahwa lulusan LKP agar dapat bekerja di DUDI sesuai dengan kemampuannya, perlu adanya dukungan dari penyelenggara LKP yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan LKP meliputi adanya pendidik yang kompeten, perencanaan pembelajaran dengan sarana prasarana yang menunjang kursus, serta terjalinnya kemitraan dengan DUDI.

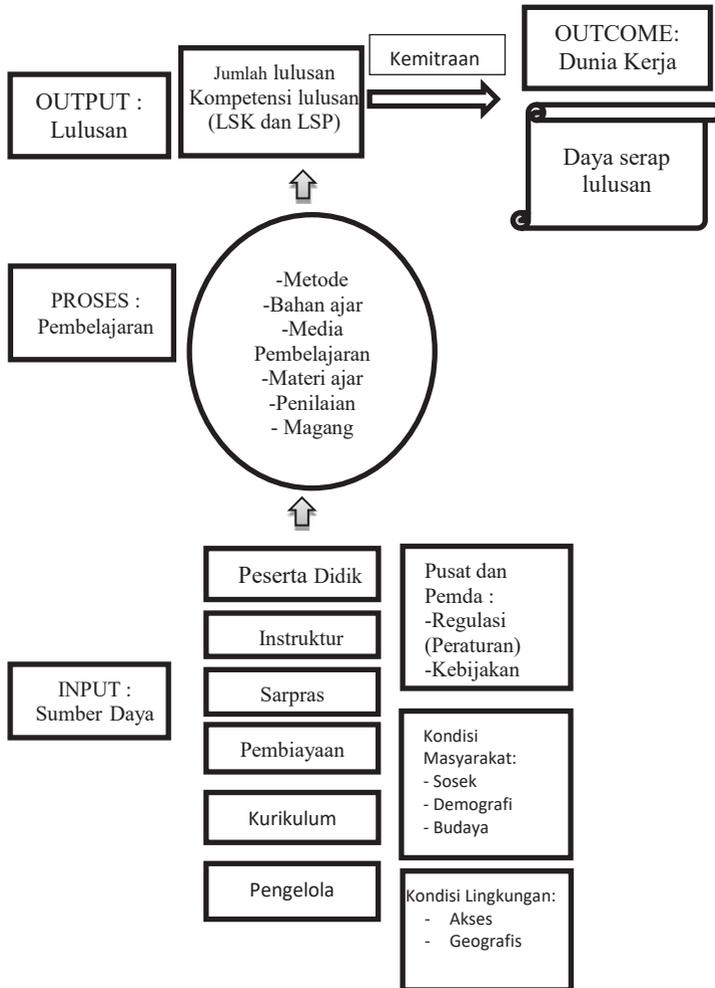
## **B. Kerangka Berpikir**

LKP diselenggarakan sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungannya. Bahkan, keberadaan lembaga kursus perlu pula didukung oleh pemerintah setempat (daerah) melalui regulasi dan kebijakannya. Penyelenggaraan kursus dan pelatihan diadakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tak heran bila peserta didik kursus pada umumnya berlatarbelakang SMA (45,51%) dan tidak melanjutkan jenjang pendidikannya. Mereka mengikuti kursus agar dapat bekerja atau berwirausaha dengan bekal keterampilan dari lembaga kursus. Untuk memberikan bekal keterampilan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun lapangan usaha,

lembaga kursus harus memiliki sarana prasarana yang memadai dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu.

Pembelajaran yang bermutu sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi lulusan (masing-masing jenis keterampilan) akan dapat diterapkan bila didukung oleh pendidik (instruktur) yang mumpuni. Pendidik selayaknya mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga lulusan kursus memiliki kompetensi yang diharapkan DUDI maupun dapat membuka lapangan usaha mandiri yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, untuk memenuhi sarana prasarana yang memadai membutuhkan pembiayaan yang tak sedikit. Disini diperlukan adanya bantuan program sarana prasarana bagi lembaga kursus, mengingat sarana prasarana sebagai media pembelajaran akan membantu menghasilkan lulusan yang kompeten.

Lulusan kursus sebelumnya harus mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) di tempat uji kompetensi (TUK) yang telah ditentukan. Warga belajar yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat dari LSK dapat mencari dan melamar pekerjaan maupun membuka lapangan usaha (berwirausaha). Agar lulusan tidak terlalu lama menunggu (menganggur) maka diperlukan adanya kerjasama (kemitraan) antara lembaga kursus dengan DUDI. Pada akhirnya, penyelenggaraan program PKK, PKW, PKM, dan magang yang sudah dilaksanakan lembaga kursus dapat bermanfaat bagi warga belajar, penyelenggara kursus dan DUDI.



Bagan 2.1 Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan

Bagan 2.1 menjelaskan tentang penyelenggaraan di lembaga kursus dan pelatihan. Ada tiga komponen pokok, yaitu input, proses, dan output yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Pertama, input di lembaga kursus merupakan sumber daya dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Sumber daya tersebut meliputi pengelola, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana, instruktur/pendidik, dan peserta didik. Semua sumber daya ini yang mendukung dalam proses pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan. Kedua, proses pembelajaran yang disiapkan oleh lembaga kursus dan pelatihan terdiri dari adanya metode pembelajarannya, bahan ajar, media pembelajaran, materi ajar, penilaian dan proses magang di tempat perusahaan dunia usaha/industri. Dalam proses pembelajaran tersebut didukung adanya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kondisi masyarakat dan lingkungan juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Namun, kedua kondisi tersebut tidak dijadikan fokus dalam penelitian ini. Ketiga, lulusan (*output*) dari hasil pembelajaran materi di lembaga kursus di peroleh LKP. Warga belajar dapat mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh LSK dan LSP sehingga warga belajar dapat bekerja di perusahaan dunia usaha/industri.

### **BAB III METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena menyajikan gambaran lengkap secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

#### **A. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) kabupaten, yaitu 1) Kabupaten Bandung Barat, 2) Kabupaten Semarang, 3) Kabupaten Boyolali, dan 4) Kabupaten Jombang. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive* (sampling bertujuan). Kriteria pemilihan LKPyaitu LKP yang menerima bantuan program PKK, program PKW, program Magang, dan Bantuan sarana prasarana berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Jumlah responden sesuai dengan sampel di setiap daerah disajikan seperti berikut ini.

Tabel 3.1. Jumlah Informan/Responden

<b>No</b>	<b>Informan/Responden</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Responden Daftar Isian:	
	- Penyelenggara kursus	8
2.	Informan FGD:	
	- Dinas Pendidikan	3
	- DUDI	2
	- Penyelenggara kursus	8
	- Instruktur kursus	4
	- Lulusan kursus	4

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang berkompeten di bidang kursus dan pelatihan, berkaitan dengan berbagai pelaksanaan program kursus dan pelatihan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan di daerah.

## **C. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) Pengisian kuesioner oleh penyelenggara kursus dan 2) Diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang diikuti oleh dinas pendidikan, LKP, dan DUDI dan wirausahawan.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Daftar isian tentang sumber daya pendidikan yang dimiliki, proses pembelajaran, serta hasil kompetensi lulusan; dan
2. Panduan DKT disusun untuk melakukan validasi hasil analisis data sekunder dan kondisi penyelenggaraan kursus dan pelatihan di LKP.

## **D. Pengolahan dan Analisis Data**

Data hasil pengumpulan data diolah secara deskripsi dan inferensial statistik. Deskripsi statistik untuk memperoleh nilai rata-rata, standar deviasi, dan persentase. Inferensial statistik untuk menguji efisiensi lulusan LKP dengan DUDI.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan temuan dalam bab ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, dibahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi dan kompetensi lulusan. Kedua, tentang efisiensi manfaat program PKK, program PKW, dan program magang. Ketiga, tentang efisiensi pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan.

#### **A. Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Kompetensi**

##### **Lulusan**

Pada bagian ini dibahas dua bagian, yaitu i) Penyelenggaraan uji kompetensi; dan ii) kompetensi lulusan. Bagian penyelenggaraan uji kompetensi diuraikan tentang faktor-faktor yang mendukung uji kompetensi, dan pelaksanaan uji kompetensi di LKP, LSK, dan LSP. Pada bagian kompetensi lulusan diuraikan hasil kompetensi yang diperoleh warga belajar.

##### **1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi**

Penyelenggara kursus dalam melakukan uji kompetensi kepada warga belajar sebagai pengakuan terhadap kompetensi pekerjaan tertentu seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61, Ayat (3). Warga belajar mengikuti tes tertulis dan praktik yang dilakukan oleh instruktur/pendidik LKP. Tes tertulis menguji materi teori dari keterampilan yang dipelajarinya, dengan cara mengisi soal-soal berbentuk pilihan ganda dan essay, pertanyaannya berkaitan dengan materi yang diberikan instruktur kepada warga belajar. Tes praktik menguji kemampuan dan keterampilan warga belajar dalam mengaplikasi materi yang mereka dapatkan

selama kursus, dengan cara menyuruh warga belajar mempraktikkan yang sudah dipraktikkan sebelumnya, seperti membuat pola dan cara menjahit setiap bagian dari pola tersebut, atau cara memotong rambut, menyanggul rambut dan sebagainya. Semua materi tes didasarkan pada ketentuan SKL.

Keberhasilan pembelajaran di kursus ditentukan pula dengan ketersediaan sarana prasarana, dokumen pembelajaran, dan penguji/instruktur kursus yang dipenuhi oleh penyelenggara LKP. Faktor dukungan pembelajaran kursus tersebut dikemukakan pula oleh Samsul (2017) bahwa dukungan lembaga kursus terkait kesiapan uji kompetensi memegang peran yang sangat penting. Dukungan lembaga mempengaruhi suasana akademik satuan pendidikan. Tanpa dukungan positif dari lembaga akan sangat sulit untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan uji kompetensi.

#### **a. Faktor-faktor yang Mendukung Uji Kompetensi**

Faktor yang mendukung dalam uji kompetensi tersebut dikaji dalam penelitian ini pada keterampilan tata busana/menjahit dan tata kecantikan rambut (TKR). Alasan kedua keterampilan tersebut karena kedua keterampilan telah memiliki SKL dan KKNI yang telah disyaratkan dalam LKP. Dari laporan LKP kedua keterampilan tersebut dan juga hasil diskusi ditemukan bahwa warga belajar dapat memperoleh nilai dalam kategori baik karena pembelajaran yang diikuti sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dalam SKL dan KKNI.

##### **1) Keterampilan Tata Busana/Menjahit**

Berdasarkan diskusi dengan penyelenggara kursus dan pengusaha tata busana ditemukan

bahwa setelah mengikuti kursus hampir semua warga belajar minimal dapat menjahit sendiri. Faktor pendukung dari keberhasilan warga belajar tersebut karena ketersediaan sarana prasarana, instruktur, dan perhatian penyelenggara kursus.

Dari data di lapangan ditemukan bahwa persyaratan minimal untuk luas lahan dan luas bangunan telah dipenuhi oleh LKP sampel bidang keterampilan tata busana/menjahit (Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.). Selain itu, ketentuan adanya ruang teori dan ruang praktik, serta ruang penunjang lainnya telah dimiliki oleh LKP tersebut.

Tabel 4.1 Rerata Luas Lahan dan Bangunan/gedung pada Keterampilan Tata Busana/Menjahit

	Prasarana	Luas (m <sup>2</sup> )			
		Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1.	Lahan	238	252	550	415
2.	Bangunan /gedung	122	267	400	329

Tabel 4.2 Rerata Jumlah Prasarana yang Dimiliki LKP/LPK pada Keterampilan Tata Busana/Menjahit

No.	Prasarana	Kab. Bandung Barat	Kab. Semarang	Kab. Boyolali	Kab. Jombang
1.	Lahan	1	1	1	1
2.	Bangunan/gedung	1	1	1	1
3.	Ruang teori	1	1 <sup>1)</sup>	1	1
4.	Ruang praktek	1	1	1	1
5.	Ruang penunjang:				
	a. Ruang pimpinan	1	1	1	1
	b. Ruang pendidik	1	1	1	1
	c. Ruang administrasi	1	1	1	1

No.	Prasarana	Kab. Bandung Barat	Kab. Semarang	Kab. Boyolali	Kab. Jombang
	d. Ruang baca	1	1	1	1
	e. Ruang tunggu	1	1	1	1
	f. Ruang simpan/gudang	1	1	1	1
	g. Ruang ibadah	1	1	1	1
	h. Toilet	1	2	1	1
	i. Ruang parkir	1	1	2	1

Catatan: <sup>1)</sup> LKP Eka Mulya di Kabupaten Semarang memiliki 8 ruang teori dan 2 ruang praktik.

Selain sarana yang disebutkan di atas, ada prasarana yang diwajibkan dalam peraturan SKL tata busana/menjahit dan harus dimiliki oleh LKP keterampilan tata busana/menjahit. Dalam Tabel 4.3. nampak berbagai variasi prasarana yang dimiliki oleh LKP dan prasarana tersebut memadai dalam keterampilan tata busana/menjahit. Prasarana lainnya yang mendukung dalam pembelajaran menjahit, seperti meja dan kursi, rak barang, almari, etalase, manikin/patung orang dan sebagainya juga telah dimiliki oleh LKP tata busana/menjahit. Namun, prasarana komputer/laptop dan LCD proyektor baru dimiliki oleh beberapa LKP tata busana/menjahit.

Tabel 4.3 Rerata Jenis dan Jumlah Sarana yang Dimiliki LKP Keterampilan Tata Busana/Menjahit

No	Kabupaten Bandung Barat		Kabupaten Semarang		Kabupaten Boyolali		Kabupaten Jombang	
	Jenis sarana	Jml	Jenis sarana	Jml	Jenis sarana	Jml	Jenis sarana	Jml
1.	Mesin high speed	1	Mesin high speed jarum 1	72	Mesin high speed	15	Mesin high speed	3
2.	Mesin jahit portable	1	Mesin high speed jarum 2	2	Mesin otomatis	1	Mesin jahit biasa	15
3.	Mesin jahit manual/hitam	1	Mesin otomatis	20	Mesin overdek	1	Mesin jahit zigzag	5
4.	Mesin obras	1	Mesin overdek	2	Mesin obras	1	Mesin obras besar	2
5.	Mesin pasang kancing	1	Mesin obras	4	Mesin jahit portable	2	Mesin obras kecil	1
6.	Seterika	1	Mesin jahit portable	2	Mesin bordir	1	Mesin neci	2
7.	Meja potong	1	Mesin bordir	2	Mesin lubang kancing	1	Mesin pasang kancing besar	1
8.	Meja setrika set	1	Mesin pasang kancing	1	Seterika uap	1	Mesin pasang kancing kecil	1
9.	Mesin lubang kancing *		Mesin lubang kancing	2	Meja potong	3	Mesin titik besar	1
10.	Mesin bordir *)		Mesin smokke	1	Meja setrika set	1	Mesin titik kecil	1
11.	Mesin otomatis *)		Mesin makeup	1			Pres kancing	1
12.	Mesin overdek *)		Mesin zig-zag	1				
13.			Mesin pres kain	1				

No	Kabupaten Bandung Barat		Kabupaten Semarang		Kabupaten Boyolali		Kabupaten Jombang	
	Jenis sarana	Jml	Jenis sarana	Jml	Jenis sarana	Jml	Jenis sarana	Jml
14.			Seterika uap	1				
15.			Meja potong	4				
16.			Meja setrika set	4				
17.			Manekin	7				
18.			Gunting listrik	1				

Catatan: \*) mesin ini hanya dimiliki oleh LKP Mekarsari yang sudah berdiri sejak lama dan satu-satunya LKP yang ditunjuk sebagai TUK di Kabupaten Bandung Barat dan dengan akreditasi B

Mencermati sarana mesin yang dimiliki oleh LKP pada Tabel 4.3, disimpulkan bahwa LKP keterampilan tata busana/menjahit telah memenuhi ketentuan yang diharuskan ada pada LKP untuk menunjang pembelajarannya. Dalam SKL tata busana/menjahit ditentukan ada enam mesin sarana pembelajaran praktik yang diharuskan dimiliki oleh LKP, yaitu 10 mesin jahit, 2 mesin obras, 1 mesin neci, 1 mesin lubang kancing khusus, 1 mesin pres kancing bungkus, dan 2 mesin jahit *high speed*. Sarana lainnya seperti alat pres manual, meja setrika, gunting bahan, penggaris pola, pita ukur, mistar, rader, karbon, jarum rangan, jarum pentul, jarum jahit juga disediakan oleh LKP. Hampir semua ketentuan sarana pembelajaran praktik tersebut telah dimiliki oleh LKP tata busana/menjahit. Temuan tersebut didukung pendapat Radias Saleh (dalam Suriah, 2006) bahwa peralatan dan perlengkapan menjahit yang digunakan untuk kegiatan menjahit dapat dikatakan baik jika setiap siswa/warga belajar menggunakan satu peralatan menjahit yang meliputi: satu mesin jahit, pita ukur, mistar, rader, karbon, jahit, gunting, meja potong, jarum tangan, jarum jahit, jarum pentul, dan manequin dengan kondisi baik. Ketersediaan fasilitas belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Dengan demikian, LKP tata busana/menjahit telah siap untuk mengikuti uji kompetensi bagi peserta didiknya karena sudah ditunjang dengan sarana yang memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan seperti diuraikan di atas dan juga telah dianalisis, maka disimpulkan bahwa kesiapan sarana

prasarana pembelajaran di LKP keterampilan tata busana/menjahit dengan kategori memadai. Dengan kategori memadai tersebut membuktikan bahwa sarana prasarana di LKP keterampilan tata busana/menjahit telah siap dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Pada Tabel 4.4. nampak bahwa kurikulum yang disusun oleh LKP yang menjahit baju secara utuh sesuai dengan ketentuan yaitu kurikulum yang berpedoman pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Khusus LKP/LPK keterampilan menjahit garmen di Kabupaten Semarang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi operator garmen/komputer.

Ada sedikit perbedaan antara kurikulum PKM/PKW dengan PKK dan program magang. Kurikulum PKM dibuat untuk memberikan kesiapan peserta didik dengan keterampilan mengenai bagaimana membuka wirausaha secara mandiri maupun bekerja sama dengan dunia usaha/industri sesuai dengan bidang keterampilan yang terdapat dalam LKP tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya materi tentang mengenal dan memahami sikap personal dan sosial sebagai seorang wirausaha, mengenal dan memahami kemampuan berfikir logik, mengenal dan memahami keterampilan produksi dan kewira-

usaha secara terpisah. Sedangkan kurikulum PKK dan magang lebih difokuskan untuk memberikan keterampilan kepada peserta didik sebagai bekal untuk bekerja di DUDI ataupun mandiri. Jenis keterampilan yang diberikan kepada peserta didik biasanya disesuaikan dengan mitra kerja dari LKP yang bersangkutan. Dalam proses pembelajaran pada umumnya jam pembelajaran lebih banyak pada praktik jika dibandingkan dengan teori.

Kurikulum yang digunakan oleh LKP tersebut, disusun bersama oleh pengelola dan instruktur, khusus di LKP Bangun Karya di Kabupaten Jombang melibatkan perusahaan dunia kerja dalam menyusun kurikulum dan dalam kegiatan belajar mengajar. Keterlibatan DUDI tersebut didukung hasil penelitian Does (2015: 46) bahwa kegiatan belajar mengajar dengan mendatangkan pakar dalam pembelajaran, mengajak peserta didik terjun langsung dalam DUDI untuk dalam mengembangkan kompetensi peserta didik dalam mengatasi permasalahan di dunia kerja. Dari pihak pengusaha garmen di Kabupaten Jombang, keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar bertujuan agar lulusan dari LKP dapat bekerja di garmen karena sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pekerjaan di garmen. Selanjutnya, instruktur dapat menyusun kurikulum sebagian di antara instruktur telah mengikuti pelatihan SKL dan KKNI (Tabel 4.4.).

Tabel 4.4 Dokumen Kurikulum pada Keterampilan tata Busana/Menjahit

No	Dokumen kurikulum	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1.	Kurikulum yang digunakan	Kurikulum berbasis KKNI	Kurikulum berbasis KKNI	Kurikulum berbasis KKNI dan SKKNI	Kurikulum berbasis KKNI
2.	Yang membuat kurikulum	Pengelola dan instruktur	Pengelola dan instruktur	Pengelola dan instruktur	Pengelola, instruktur, & DUDI

Tabel 4.5 Persentase Instruktur yang Telah Mengikuti Pelatihan SKL dan KKNI

No	Jenis pelatihan yang diikuti instruktur	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1.	Pelatihan SKL	57.1	40.0	50.0	50.0
2.	Pelatihan KKNI	42.9	60.0	50.0	50.0

Faktor lain yang mempengaruhi uji kompetensi adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pendidik/instruktur sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran ini meliputi: peran serta pendidik/instruktur dalam penyusunan silabus, keterkaitan standar kompetensi pada silabus dengan standar kompetensi lulusan, peran serta pendidik/instruktur dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pembuatan modul. Perencanaan materi pembelajaran selalu mengacu pada kompetensi-kompetensi yang ada pada SKKNI keterampilan tata busana/menjahit. RPP disiapkan sejak dari

awal dan menyatu dengan modul yang telah dibuat. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengelola dan instruktur menyatakan bahwa silabus disusun oleh instruktur LKP keterampilan tata busana/menjahit sesuai dengan ketentuan SKL dan KKNi (Tabel 4.5). Demikian pula dengan RPP disusun oleh instruktur LKP keterampilan tata busana/menjahit. Adapun modul sudah ada dari dinas pendidikan, namun instruktur mengembangkan lebih lanjut modul tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan LKP dan DUDI.

Dari uraian tentang perencanaan pembelajaran tersebut, ditemukan bahwa LKP keterampilan tata busana/menjahit telah mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan baik. Semua ketentuan dalam perencanaan pembelajaran tersebut membuktikan bahwa LKP keterampilan tata busana/menjahit telah siap dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Tabel 4.6 Silabus dan RPP di Keterampilan Tata Busana/Menjahit

No.	Dokumen kurikulum	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1.	Yang membuat silabus	Pengelola dan instruktur	Pengelola dan instruktur	Pengelola dan instruktur	Pengelola dan instruktur
2.	Pedoman penyusunan silabus	KKNi dan SKL	KKNi dan SKL	KKNi dan SKL	KKNi dan SKL
3.	Yang membuat RPP	Instruktur	Instruktur	Instruktur	Instruktur

Sumber: Data diolah dari LKP keterampilan tata busana/menjahit di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang

## 2) Keterampilan TKR

SKL TKR tidak jauh berbeda dengan keterampilan tata busana/menjahit dalam kepemilikan status luas lahan dan luas bangunan yaitu bisa milik sendiri atau sewa. Perbedaan pada luas bangunan, LKP TKR minimal 80 meter persegi, kapasitas ruang pembelajaran teori maksimal untuk 20 orang peserta, dan ruang praktik dengan rasio 3 meter persegi untuk 1 orang peserta (60 meter persegi).

Dari data di lapangan ditemukan bahwa LKP TKR telah memenuhi persyaratan dalam pendirian LKP seperti luas lahan dan bangunan/gedung (Tabel 4.7.). Selain itu, ketentuan adanya jenis prasarana lainnya seperti ruang teori dan praktek belajar juga sudah dipenuhi oleh pengelola LKP, termasuk ruang prasarana penunjang lainnya (Tabel 4.8).

Tabel 4.7 Rerata Luas Lahan dan Bangunan/ Gedung pada Keterampilan TKR

No.	Prasarana	Kabupaten Banjar	Kabupaten Jombang
1.	Lahan	200	175
2.	Bangunan/gedung	170	150

Tabel 4.8 Rerata Jenis dan Jumlah Prasarana yang Dimiliki LKP/LPK Keterampilan TKR

No.	Jenis prasarana	Jumlah prasarana	
		Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Jombang
1.	Lahan	1	1
2.	Bangunan/gedung	1	1
3.	Ruang teori	1	1
4.	Ruang praktek	1	1
5.	Ruang penunjang:		
	a. Ruang pimpinan	1	1
	b. Ruang pendidik	1	1
	c. Ruang administrasi	1	1
	d. Ruang baca	1	1
	e. Ruang tunggu	1	1
	f. Ruang simpan/gudang	1	1
	g. Ruang ibadah	1	1
	h. Toilet	1	1
	i. Ruang parkir	1	1

Sumber: Data diolah dari LKP keterampilan TKR di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang.

Dalam SKL TKR ada 61 sarana pembelajaran praktik utama antara lain meja dan kursi pendidik, meja kaca rias dan kursi peserta didik, *washbak*, *gayung/shower*, *drogkap*, *steamer*, *climong*, pengering genggam/*hairdryer*, catok/*curling iron*, *hairpiece*/rambut palsu, dan sebagainya. Data dari LKP TKR pada Tabel 4.9, nampak bahwa hampir semua sarana pembelajaran praktik telah dipenuhi oleh pengelola LKP.

Tabel 4.9 Rerata Jenis dan Jumlah Sarana yang Dimiliki  
LKP/LPK keterampilan TKR

No.	Kabupaten Bandung Barat		Kabupaten Jombang	
	Jenis sarana	Jumlah	Jenis sarana	Jumlah
1.	Cermin	30	Cermin besar	1
2.	Kursi praktek dan campus	25	Kursi potong	20
3.	Tempat cuci rambut/washbak	2	Tempat cuci rambut	1
4.	Drogkap	2	Drougkap	2
5.	Steamer	4	Steamer	2
6.	Hairdryer	4	Hairdryer	5
7.	Gunting rambut/potong	7	Gunting potong	5
8.	Aneka sisir	15	Papan tulis	1
9.	Boneka pop	2	Komputer	1
10.			Printer	1

Sumber: Data diolah dari LKP keterampilan TKR di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang.

Dokumen kurikulum yang disyaratkan dalam lembaga kursus harus merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan sesuai dengan ketentuan BSNP-PNF. Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata LKP TKR telah menggunakan kurikulum berbasis KKNI (Tabel 4.10). Kurikulum tersebut disusun bersama oleh pengelola dan instruktur, kecuali di Kabupaten Jombang LKP TKR Topsy melibatkan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum.

Tabel 4.10 Dokumen Kurikulum pada Keterampilan TKR

No.	Dokumen Kurikulum	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Jombang
1.	Kurikulum yang digunakan	Kurikulum berbasis KKNI	Kurikulum berbasis KKNI
2.	Penyusun kurikulum	Pengelola dan instruktur	Pengelola, instruktur, dan DUDI

Sumber: Data diolah dari LKP keterampilan TKR di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang.

Dalam perencanaan pembelajaran, LKP harus menyediakan silabus dan RPP. Pada LKP TKR dalam kajian ini silabus dan RPP telah disusun oleh pengelola dan instruktur keterampilan TKR. Silabus yang disusun tersebut berpedoman pada SKL dan KKNI.

Tabel 4.11 Silabus dan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP) di Keterampilan TKR

No	Dokumen kurikulum	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Jombang
1.	Penyusun silabus	Pengelola dan instruktur	Pengelola dan instruktur
2.	Pedoman penyusunan silabus	KKNI dan SKL	KKNI dan SKL
3.	Penyusun RPP	Instruktur	Instruktur

Sumber: Data diolah dari LKP TKR di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang.

Hasil analisis data dan temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa kesiapan sarana prasarana dan dokumen kurikulum, serta perencanaan pembelajaran pada LKP keterampilan tata busana/menjahit dan TKR sudah memadai sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam SKL kedua keterampilan tersebut. Dengan kondisi yang memadai tersebut membuktikan bahwa kesiapan sarana prasarana dan dokumen kurikulum, serta perencanaan pembelajaran pada LKP tata busana/menjahit dan TKR telah siap dalam pelaksanaan uji kompetensi. Pembuktian tersebut didukung pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2017), bahwa penyelenggaraan uji kompetensi akan menghasilkan nilai yang komprehensif jika didukung adanya kesiapan sarana prasarana, dokumen kurikulum, dan perencanaan pembelajaran pada LKP.

#### **b. Pelaksanaan Uji Kompetensi di LKP, LSK, dan LSP**

Uji keterampilan yang diikuti peserta didik ada tiga jenis yaitu:

- 1) Uji lokal di LKP (diselenggarakan oleh penyelenggara dan instruktur di LKP)
- 2) Uji kompetensi LSK (diselenggarakan oleh Negara melalui penguji dari LSK)
- 3) Uji profesional LSP (diselenggarakan oleh instruktur di perusahaan)

Pada umumnya peserta didik mengikuti dua uji lokal/kompetensi di LKP dan hanya sebagian yang mengikuti uji kompetensi di LSK. Dari hasil DKT pengelola LKP mengatakan bahwa peserta didik jarang mengikuti uji kompetensi LSP karena sudah ingin bekerja. Kecuali keterampilan menjahit *upper* sepatu yang mengikuti uji lokal LKP dan LSP, dengan alasan belum ada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan LSK untuk keterampilan menjahit *upper* sepatu.

**Uji lokal LKP** dilakukan setelah peserta didik selesai mengikuti pembelajaran teori dan praktik. Pada keterampilan tata busana/menjahit, lama kursus rata-rata dua bulan (Tabel 4.12.), kecuali LKP Bangun Karya di Kabupaten Jombang hanya satu bulan dengan keterampilan menjahit *upper* sepatu. Proposisi pembelajaran antara teori dengan praktik, lebih banyak pada praktik (70 persen) jika dibandingkan dengan teori (30 persen) terjadi pada kedua keterampilan tata busana/menjahit dan TKR. Berbeda dengan keterampilan tata busana/menjahit, pada keterampilan TKR waktu pembelajaran selama tiga bulan (Tabel 4.13.).

Tabel 4.12 Lama Kursus dan Proposi Pembelajaran di LKP Keterampilan Tata Busana/Menjahit

No	Lama kursus dan proporsi pembelajaran	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1.	Waktu pembelajaran	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan
2.	Proposi pembelajaran				
	a. Teori	30 %	30 %	30 %	30 %
	b. Praktiek	70 %	70 %	70 %	70 %

Tabel 4.13 Lama Kursus dan Proporsi Pembelajaran LKP Keterampilan TKR

No	Lama Kursus dan Proporsi Pembelajaran	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Jombang
1.	Waktu pembelajaran	± 3 bulan	3 bulan
2.	Proporsi pembelajaran:		
	a. Teori	30 %	30 %
	b. Praktik	70 %	70 %

Dari data di LKP, hampir semua warga belajar yang mengikuti kursus tata busana/menjahit dan TKR lulus dalam uji kompetensi LKP. Namun, ada beberapa LKP seperti LKP Mei Li dan LKP Karya Utama di Kabupaten Boyolali, serta LKP Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat terdapat 15 persen warga belajar tidak lulus tes yang diselenggarakan oleh penyelenggara LKP. Berbagai alasan tidak lulus karena ada warga belajar yang tidak mengikuti tes praktiek, kurangnya pengetahuan dalam praktik, dan rendahnya nilai tes teori. Menurut penyelenggara LKP, rendahnya nilai teori dan praktik dimungkinkan karena latar belakang pendidikan warga belajar yang relatif masih kurang seperti di Kabupaten Boyolali 44 persen warga belajar berpendidikan SMA/ sederajat dan 56 persen berpendidikan lulusan SMP dan SD. Oleh karenanya agar diperoleh hasil yang baik, dukungan melalui pendampingan dari penyelenggara dan instruktur yang berpengalaman, serta fasilitas terbukti membantu warga belajar memperoleh keterampilan dengan baik.

**Uji kompetensi LSK** merupakan uji kompetensi yang berstandar nasional. Penyelenggara LKP menyarankan warga belajar yang telah lulus kursus

untuk mengikuti ujian Negara oleh LSK. Oleh karenanya warga belajar yang akan mengikuti uji kompetensi LSK harus mendaftar terlebih dahulu ke TUK.

Keberadaan TUK ini ditetapkan oleh LSK setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana. Saat ini sudah ditetapkan 579 TUK untuk 26 bidang keterampilan. Target sampai dengan 2015, terdapat 2.000 TUK untuk 60 jenis keterampilan. Berikut dijelaskan alur uji kompetensi LSK:

- a. Peserta didik kursus atau warga masyarakat secara individu atau kolektif mendaftarkan uji kompetensi di TUK.
- b. TUK melaporkan ke LSK tentang jadwal dan peserta calon uji kompetensi.
- c. TUK menugaskan penguji dengan seperangkat alat uji kompetensi untuk melakukan uji kompetensi di TUK.
- d. Penguji melakukan uji kompetensi di TUK.
- e. Penguji mengolah hasil uji kompetensi dan hasilnya diserahkan kepada LSK.
- f. LSK menetapkan peserta uji kompetensi yang lulus (berkompeten) atau tidak lulus (belum berkompeten) dan hasilnya dilaporkan ke Ditbinsuskel.
- g. Ditbinsuskel mengirimkan blanko sertifikat uji kompetensi ke LSK.
- h. LSK mengisi blanko sertifikat dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris LSK dan hasilnya dikirimkan ke TUK.

- i. TUK menerima sertifikat dari LSK dan menyerahkan kepada peserta didik yang berkompeten (lulus).
- j. Ditbinsuskel dan Dinas Pendidikan dapat melakukan monitoring sebagai bagian dari pengendalian.

Berdasarkan data pengumuman penyelenggaraan uji kompetensi LSK pada Mei dan November 2016, diperoleh ketentuan biaya yang harus disediakan oleh setiap peserta didik seperti disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Biaya uji kompetensi LSK tata busana/menjahit

No	Tanggal uji kompetensi LSK	Level 1	Level 2	Level 3
1.	Mei 2016	Rp 250.000,-	Rp 500.000,-	-
2.	November 2016	-	Rp 450.000,- 1)	Rp 500.000,- 2)

Catatan: 1) Biaya harus disetor ke LSK Rp 175.000,- (Rp 100.000,- untuk transport penguji)

2) Biaya harus disetor ke LSK sebesar Rp 150.000,-.

Menurut pengelola/penyelenggara kursus tata busana/menjahit tidak semua peserta didik dapat mengikuti uji kompetensi di LSK. Alasan penyelenggara kursus adalah karena peserta didik tidak memiliki biaya untuk membayar uji kompetensi LSK seperti di atas. Biaya tersebut dirasakan berat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga peserta didik dari program PKW di LPK Surya Intan hanya mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LKP nya

saja. Selain itu, perusahaan DUDI tidak mewajibkan calon pegawainya memiliki sertifikat dari uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK. Seringkali sertifikat baru keluar setelah enam bulan ujian dan peserta didik sendiri sudah bekerja di perusahaan atau mendirikan usaha baru.

## **2. Kompetensi Lulusan**

Dari penjelasan beberapa penyelenggara kursus seperti LPK Surya Intan di Kabupaten Semarang, diketahui bahwa ada tiga klasifikasi nilai uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara LKP/LPK yaitu:

- a. Nilai 91 – 100 = A (sangat memuaskan)
- b. Nilai 81 – 90 = B (memuaskan)
- c. Nilai 71 – 80 = C (cukup memuaskan)

Berdasarkan kategori tersebut, dan keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LKP, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai uji kompetensi peserta didik yang mendapat program PKW menunjukkan hasil yang memuaskan
- b. Nilai uji kompetensi peserta didik dari bantuan sarana menunjukkan hasil memuaskan.
- c. Nilai uji kompetensi peserta didik yang mendapat program PKK menunjukkan hasil cukup memuaskan.
- d. Nilai uji kompetensi peserta didik yang mendapat bantuan magang menunjukkan hasil cukup memuaskan, kecuali di Kabupaten Bandung Barat mendapat nilai memuaskan.

Tabel 4.15 Rerata Nilai Uji Kompetensi yang Dilakukan Oleh LKP

No	Kabupaten	Rerata nilai uji kompetensi LKP			
		Program PKK	Program PKW	Program magang	Bantuan sarana
1.	Kabupaten Bandung Barat	78.91	94.25	87.51	85.67
2.	Kabupaten Semarang	74.08	88.94	79.00	89.78
3.	Kabupaten Boyolali	78.42	86.00	72.49	80.00
4.	Kabupaten Jombang	78.39	85.30	78.17	81.40
	Rerata Keseluruhan	77.45	89.50	79.29	84.21

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang.

Catatan: Pada program pemberian bantuan sarana prasarana tidak pelatihan khusus. LKP menerima sarana sesuai dengan proposal yang diajukan.

Mencermati hasil nilai uji lokal yang dilakukan oleh penyelenggara LKP, disimpulkan bahwa hasilnya cukup memuaskan bagi lulusan dari program PKK karena sesuai dengan tujuannya LKP hanya memberikan bekal keterampilan agar lulusannya dapat bekerja di DUDI. Dengan latar belakang dari peserta didik yang sebagian besar hanya lulusan SMP (Paket B) tentunya pengetahuan mereka masih kurang dalam menguasai materi kursus, khususnya tata busana/menjahit. Berbeda dengan lulusan dari program PKW/PKM, lulusannya diberi bekal pengetahuan dan ditanamkan sikap dan jiwa wirausaha agar dapat bekerja sendiri atau menciptakan usaha baru sehingga mereka memiliki daya juang untuk lebih survive. Selain itu, pada program PKW/PKM lulusannya diberi kesempatan mengikuti magang di DUDI sehingga lebih menguasai materi kursus yang diikutinya.

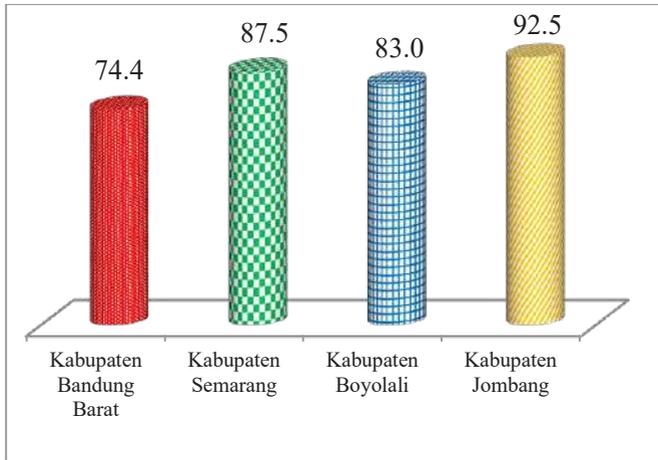
Peserta didik LKP Karya Abadi berjumlah 25 orang dan sebanyak 21 orang yang ikut uji kompetensi. Empat orang yang tidak ikut uji kompetensi disebabkan ketidakadaan biaya. Hasil rerata uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LKP hasilnya cukup memuaskan. Peserta didik LKP yang ikut uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK/LSP dinyatakan lulus jika nilai ujiannya bernilai  $\geq 80$ , Sedangkan yang mendapat nilai  $< 80$  dinyatakan belum kompeten (tidak lulus). Biaya ikut uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK/LSP bervariasi disesuaikan dengan jenis/bidang keterampilan dan jenjangnya.

Menurut pengelola LKP, tidak semua peserta didik yang mengikuti kursus dan pelatihan keterampilan tata busana dan TKR mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK. Hal ini disebabkan peserta didik tidak memiliki biaya untuk membayar uji kompetensi LSK. Seperti yang dikemukakan oleh penyelenggara LKP Surya Intan di Kabupaten Semarang bahwa peserta didik harus membayar uji kompetensi sebesar Rp 450.000,-. Biaya tersebut dirasakan berat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga peserta didik dari program PKW di LKP Surya Intan hanya mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LKP nya saja.

Bagi peserta didik yang mendapat bantuan program magang di perusahaan, mereka jarang mengikuti uji kompetensi di LSK karena setelah mengikuti magang di perusahaan, mereka langsung bekerja di perusahaan tempat mereka mengikuti magang. Selain itu, perusahaan garmen/konveksi tidak menuntut kepada lulusan LKP harus memiliki sertifikat dari pemerintah/negara. Perusahaan mewajibkan lulusan

LKP dapat bekerja sesuai jenis pekerjaan yang dituntut perusahaan.

Untuk menentukan seorang peserta didik PKK, PKM, dan magang dinyatakan berkompeten setelah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK, maka LSK menentukan batas minimal penetapan kompetensi adalah nilai akhir kompeten sebesar  $\geq 80.0$  (nilai 80.0 atau lebih dari 80.0). Namun dari data yang diperoleh di LKP ternyata di Kabupaten Bandung Barat nilai rerata uji kompetensi LSK hanya mencapai 74.4 (Gambar 4.1.). Artinya nilai 74.4 dianggap tidak kompeten. Ketentuan batas minimal penetapan kompetensi dari LSK tersebut, diterapkan di setiap daerah. Namun ada daerah yang LSKnya menerapkan batas minimalnya lebih tinggi dari 80 yaitu 85.0 seperti yang diungkapkan oleh pengelola TKR Kimmi, di Pekanbaru (2016). Menurut pengelola TKR Kimmi, bagi peserta didik yang ikut uji kompetensi tetapi tidak lulus, mereka masih bisa mengulang dengan ikut uji kompetensi kembali. Jika peserta didik tidak lulus di teori maka hanya mengulang di uji teori. Jika tak lulus di praktik maka hanya mengulang ujian praktik.

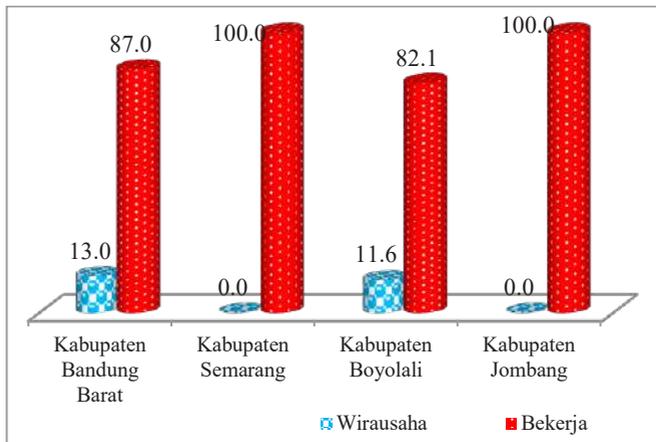


Gambar 4.1 Rerata Nilai Uji Kompetensi LSK

Ketentuan batas nilai minimal 80 bagi warga belajar yang mengikuti kursus, menunjukkan bahwa tenaga lulusan kursus dan pelatihan diharapkan mampu bersaing dalam mengisi jabatan di perusahaan. Apalagi dengan masuknya tenaga asing ke Indonesia melalui pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menuntut bagi tenaga kerja dari lulusan kursus dan pelatihan harus meningkatkan kemampuannya dan siap bersaing dengan tenaga asing. Prediksi ini mulai dikembangkan oleh penyelenggara LKP dengan menentukan batas minimal lulusan kursus dan pelatihan yaitu lulusan LKP mampu bersaing dalam mengisi ketenagakerjaan di perusahaan.

**Lulusan bekerja/berwirausaha.** Berdasarkan data dari LKP sampel diperoleh hasil bahwa lulusan yang mendapat bantuan program PKK hampir seluruhnya bekerja di perusahaan (Gambar 4.2). Hasil ini sesuai dengan tujuan dari diberikannya program PKK bahwa peserta didik yang mendapat program PKK memiliki

keterampilan sesuai dengan jenis kursus yang diikuti sehingga mereka dapat bekerja di perusahaan. Sebagai contoh di LKP Mei-Li yang terdapat di Kabupaten Boyolali, ada 40 lulusan yang mendapat program PKK dan mereka bekerja di perusahaan dan konveksi yang menjadi mitra LKP Mei-Li. Berikut rincian lulusan peserta didik LKP Mei-Li yang diterima bekerja: 47,5 persen diantaranya bekerja di PT San Kyung Jaya, 22,5 persen bekerja di PT Pan Pasifik Knit, dan 30 persen bekerja di konveksi.



Gambar 4.2 Lulusan Program PKK yang Berwirausaha dan Bekerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lulusan kursus dan pelatihan lebih dominan bekerja di perusahaan gaermen, sehingga para lulusan ini harus siap bersaing dalam menempati jabatan di perusahaan. Sejalan dengan pendapat Suharyadi (2015) bahwa tenaga kerja akan mengalami dampak dari MEA sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang berpotensi. Jika berdaya saing rendah para tenaga kerja berpotensi menjadi

pengangguran dan ini jumlahnya diperkirakan cukup signifikan.

Kenyataan bahwa lulusan program PKK bekerja di perusahaan disebabkan karena adanya pendampingan bagi warga belajar selama mengikuti kursus. Pentingnya peran pendamping tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitjakdikbud (2014: 148-149) bahwa bentuk pendampingan bagi warga belajar berupa nasihat agar warga belajar semangat dalam mengikuti kursus sehingga di kemudian hari dapat bekerja dengan baik di perusahaan.

Dari diskusi dengan pengelola dan instruktur LKP dikatakan bahwa semua peserta didik mengikuti kursus tata busana dan tata kecantikan rambut mengikuti kursus sampai selesai dan lulus. Setelah itu mereka akan bekerja atau berwirausaha sendiri. Karena jika pada awal ada peserta didik yang mengundurkan diri maka pengelola akan mencari gantinya dan harus sesuai dengan ketentuan dari bantuan program yang diterimanya. Sebagai contoh di LKP Yenny, Kabupaten Jombang ada peserta didik yang mengundurkan diri dari pembelajaran dengan alasan sibuk mengurus anak atau diimingi oleh pengelola LKP lain bahwa akan diberi alat pembelajaran atau dicarikan pekerjaan. Kenyataan tersebut membuat pengelola LKP harus mencari pengganti dari peserta didik tersebut.

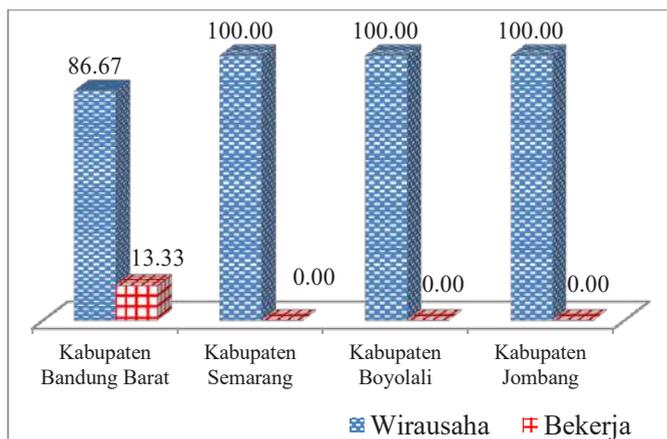
Pada program PKW hampir seluruh lulusannya berwirausaha atau menciptakan pekerjaan baru, kecuali di Kabupaten Bandung Barat masih ada lulusannya (13.33 persen) bekerja di perusahaan (Gambar 4.3.). Kenyataan ini menunjukkan bahwa lulusan dari program PKW sudah diarahkan menjadi wirausaha sesuai dengan petunjuk teknis program PKW, yaitu memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausaha

dan menanamkan sikap, jiwa wirausaha, dan etika bisnis kepada peserta didik. Beberapa LKP menyatakan ada beberapa cara yang ditempuh LKP untuk para lulusan program PKW yang belum memiliki modal yaitu: (i) Membentuk kelompok kerjasama antar lulusan/alumni dengan mendirikan usaha baru. Setelah setahun mereka telah memiliki modal sendiri maka mereka mendirikan usaha sendiri; (ii) Pengelola memberikan pinjaman modal (berupa uang atau alat) untuk para lulusannya mendirikan usaha sendiri (sebagai penjahit). Pinjaman modal tersebut dikembalikan ketika alumni/lulusan memiliki uang dari keuntungan berwirausaha; (iii) Pengelola LKP memberikan order/pekerjaan kepada alumni dan modalnya berasal dari pengelola LKP. Sebagai contoh:

- a. Pengelola LKP Modes Widya Indah, Kabupaten Jombang melakukan 3 bantuan yaitu: (i) Meminjamkan modal kepada lulusan yang belum memiliki modal usaha; (ii) Memberikan order kerjaan dimana pengelola memberikan pinjaman pembelian bahan (kain), setelah selesai jahitan baju, lulusan/alumni akan mengembalikan pinjaman tadi; dan (iii) Memberikan pinjaman modal pembelian alat mesin/bahan kepada alumni/lulusan yang bekerjasama dalam membuka usaha baru. Pinjaman modal akan dikembalikan ketika mereka telah memiliki keuntungan dari jahitan baju.
- b. Pengelola LKP Mei Li, Kabupaten Boyolali melakukan 3 bantuan yaitu: (i) Meminjamkan modal alat mesin jahit kepada lulusan program PKW. Mesin jahit tersebut akan dikembalikan setelah lulusan tersebut mampu membeli sendiri mesin jahit; (ii) Mendirikan pusat bisnis yaitu LKP menerima para lulusannya untuk bekerja dalam jasa menjahit

dan mencari order menjahit dari masyarakat dan perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa program PKW memberi dampak yang baik bagi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan pekerjaan sehingga kesejahteraannya ikut meningkat.



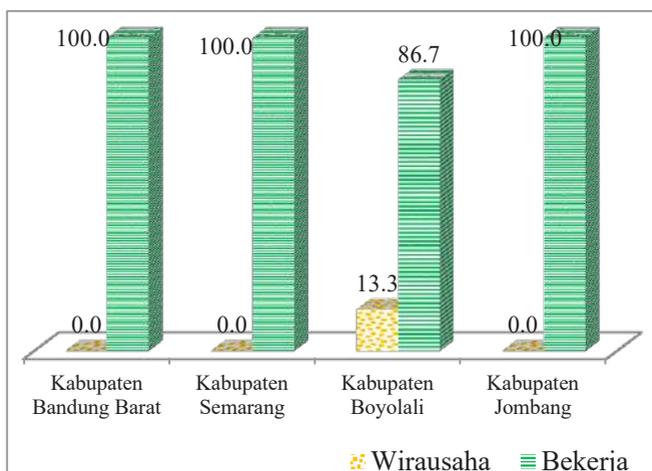
Gambar 4.3 Lulusan Program PKW yang Berwirausaha dan Bekerja

Banyaknya lulusan program PKW yang menjadi wirausaha tidak hanya dibekali materi wirausaha selama mengikuti kursus, namun adanya motivasi dari warga belajar yang semula hanya ingin mencari pekerjaan berubah menjadi keinginan untuk berwirausaha. Asumsi ini didukung hasil penelitian dari Henny (2015) bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pemberian motivasi dan dukungan pasca kelulusan terhadap sikap wirausaha. Motivasi menjadikan seseorang lebih mempunyai kemauan dan lebih berjuang untuk memperoleh apa yang diinginkan. Motivasi inilah yang

membuat seseorang lebih bersemangat untuk mencapai cita-citanya. Motivasi berwirausaha merupakan dorongan seseorang yang dilandasi pada kebutuhannya dalam membuka suatu lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang mandiri (wirausaha). Hal ini senada dengan pendapat Panji Anoraga (dalam Henny, 2015) bahwa motivasi berperan sebagai pendorong kemauan dan keinginan seseorang, serta sejalan dengan pendapat Oemar Hamalik (dalam Henny, 2015) yang mengemukakan bahwa motivasi mendorong timbulnya tingkah laku, mempengaruhi serta mengubah tingkah laku.

Pada Gambar 4.4. nampak bahwa lulusan LKP yang mendapat bantuan program magang bekerja di perusahaan atau konveksi. Menurut pengelola dan lulusan LKP mengatakan bahwa peserta didik yang mendapat bantuan program magang akan belajar di perusahaan satu bulan untuk praktik (setelah belajar teori di LKP). Setelah selesai magang di perusahaan dan lulus dari LKP, pada umumnya mereka akan bekerja di perusahaan tempat mereka mengikuti magang. Alasannya mereka sudah mengetahui pola kerja dari perusahaan tersebut.

Pejabat di perusahaan garmen (PT Sumber Citra Persada, Kabupaten Jombang) mengatakan, bahwa lulusan LKP akan dites terlebih dahulu untuk menjadi tenaga kerja di DUDI. Tes yang dilakukan oleh pengawas dari DUDI adalah wawancara dan tes keterampilan. Walaupun DUDI dan LKP sudah menjalin kerjasama dalam pemagangan, tetap saja lulusan LKP harus mengikuti prosedur penerimaan pegawai baru di DUDI. Bagi lulusan LKP yang kurang terampil, maka DUDI akan memberi kesempatan untuk mengikuti *training* di DUDI.

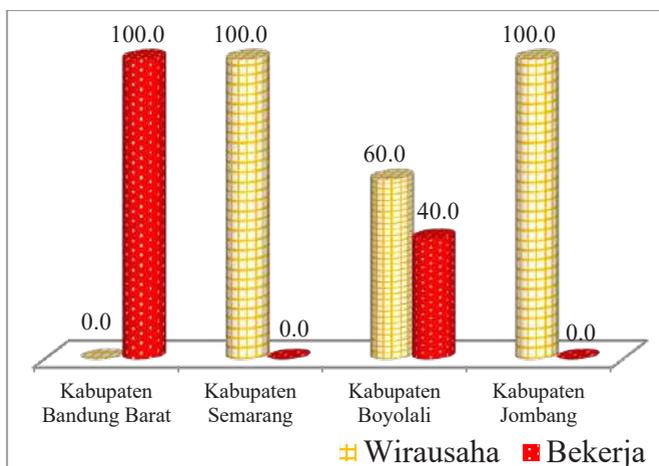


Gambar 4.4 Lulusan dari Program Magang yang Berwirausaha dan Bekerja

Hasil penelitian Bayu (2017) menunjukkan bahwa pemagangan yang diikuti warga belajar memberikan gambaran dan keadaan sebenarnya kepada peserta didik/warga belajar tentang DUDI. Pemagangan ini merupakan salah satu peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Selanjutnya, adanya instruktur dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berpengalaman dalam dunia wirausaha di bidang tata busana/menjahit berpengaruh pada warga belajar yang belajar di kursus untuk dapat menjadi wirausaha. Hal ini didukung hasil penelitian Hikam, dkk (TT) yang mengatakan bahwa keberhasilan magang bagi warga belajar dipengaruhi oleh peran fasilitator. Setelah mengikuti kegiatan magang warga belajar magang mencapai tingkat keberdayaan yakni mampu memiliki kemampuan dalam meningkatkan perekonomian, kemampuan

mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis.

Mencermati pada Gambar 4.5., nampak bahwa lulusan dari LKP keterampilan menjahit yang mendapat bantuan sarana prasarana dari pemerintah mengalami perbedaan dalam bekerja atau berwirausaha. Di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Jombang semua lulusan LKP dari bantuan sarana berwirausaha atau menciptakan pekerjaan baru seperti menjadi penjahit karena telah dilatih keterampilan menjahit, sedangkan di Kabupaten Bandung Barat lulusan LKP dari bantuan sarana memilih bekerja di perusahaan garmen atau konveksi. Alasannya lulusan ini ingin bekerja di perusahaan karena pekerjaan di perusahaan garmen hanya mengerjakan satu aspek/bagian, bukan menjahit satu baju secara keseluruhan. Contohnya pekerja hanya membuat kerah atau bagian lengan. Selanjutnya, di Kabupaten Boyolali sebagian lulusan LKP dari bantuan sarana menjadi wirausaha dan sebagian lagi menjadi pekerja di perusahaan garmen atau konveksi. Temuan ini menunjukkan bahwa lulusan LKP keterampilan tata busana dapat menciptakan lapangan kerja baru sebagai penjahit, dengan alasan peralatan untuk menjahit relatif tidak mahal dan mudah diperoleh.



Gambar 4.5 Lulusan dari Bantuan Sarana yang Berwirausaha dan Bekerja

Temuan tersebut didukung oleh pernyataan dari ketua Forum LKP di Kabupaten Jombang bahwa lulusan LKP dengan keterampilan yang bersifat padat karya akan mudah memperoleh pekerjaan. Lulusan dari keterampilan tata busana/menjahit dan tata kecantikan rambut merupakan salah satu keterampilan yang mudah mendapat pekerjaan bagi lulusannya. Berbeda dengan keterampilan lainnya seperti komputer, memang setelah lulus masih menunggu penempatan yang cukup lama hampir satu tahun karena di perusahaan terbatas lowongan pekerjaan di bidang administrasi yang membutuhkan keterampilan komputer. Kenyataan tersebut dapat dipahami mengingat hasil data sekunder yang dilakukan Tim pusat menunjukkan bahwa masih ada lulusan kursus (45 persen) yang belum bekerja. Disinyalir lulusan yang belum bekerja tersebut berasal dari keterampilan yang sulit menyerap pekerjaan seperti keterampilan hantaran, komputer dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan termasuk di kursus, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar pendidikan. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan warga belajar selama mengikuti kursus dan pelatihan. Kenyataan di lapangan masih banyak LKP yang belum memiliki sarana prasarana yang lengkap sesuai dengan standar SKL. Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan Legiwati (2016: 307-308) bahwa kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMP. Dengan kelengkapan sarana prasarana memudahkan anak dalam melakukan aktivitas belajar sehingga anak lebih semangat dalam belajar. Sebaliknya, dengan kurangnya sarana belajar akan mengakibatkan anak kurang bersemangat dan kurang bergairah dalam belajar. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi prestasi belajar anak. Dalam kaitannya dengan LKP bantuan sarana prasarana dari pemerintah sangat bermanfaat untuk melengkapi sarana prasarana yang masih kurang dimiliki LKP.

## **B. Pemanfaatan Bantuan Sarana**

### **1. Manfaat Bantuan Sarana Bagi Warga Belajar**

#### **a. Keterampilan tata busana/menjahit**

Tabel 4.16. menunjukkan adanya keragaman dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki peserta didik yang mendapat bantuan sarana prasarana. Di Kabupaten Bandung Barat semua peserta didiknya berpendidikan SMA/MA/Paket C, sedangkan di Kabupaten Boyolali peserta didiknya berpendidikan lulusan SMP/MTs/Paket B (66,7 persen) lebih

banyak jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Berbeda di Kabupaten Jombang peserta didik dengan lulusan SD/MI/Paket A (40 persen) cukup banyak jika dibandingkan dengan peserta didik dari kabupaten lain. Selain pendidikan rendah, mereka dapat dikatakan sebagai putus sekolah. Hal ini dapat diketahui dari usia peserta didik yang mengikuti program sarana mulai dari 16 tahun sampai 40 tahun (Tabel 4.16). Usia sampai 40 tahun dapat dikatakan sebagai usia dewasa. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapat bantuan sarana dari pemerintah berada dalam kondisi putus sekolah.

Dari data LKP diketahui bahwa peserta didik dari bantuan sarana belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur. Dengan demikian, kondisi peserta didik yang rendah dan/atau putus sekolah, serta belum bekerja (menganggur) tersebut sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis pemberian bantuan sarana prasarana.

Tabel 4.16 Peresentase Kualifikasi Pendidikan Peserta Didik yang Mendapat Bantuan Sarana

No	Kualifikasi pendidikan	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1	Tidak sekolah	0.0	0.0	0.0	0.0
2	SD/MI/Paket A	0.0	16.7	25.0	40.0
3	SMP/MTs/Paket B	0.0	33.3	66.7	20.0
4	SMA/MA/Paket C	100.0	33.3	8.3	40.0
5	SMK/MAK	0.0	16.7	0.0	0.0
6	D1/D2/D3	0.0	0.0	0.0	0.0
7	D4/S1	0.0	0.0	0.0	0.0

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang.

Keragaman pendidikan tersebut menunjukkan bahwa bantuan sarana prasarana dapat dimanfaatkan semua warga belajar di kursus ataupun di satuan pendidikan lainnya. Pernyataan tersebut didukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurubay (dalam Legiwati, 2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan/pengaruh yang sedang atau cukup antara variabel pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dengan variable motivasi belajar siswa SMP Dua Mei Ciputat. Artinya, kondisi latar belakang pendidikan dari LKP dapat memanfaatkan sarana prasarana di LKP sehingga motivasi warga belajar di kursus lebih semangat, termasuk warga belajar dengan rentang usia 16 sampai dengan 40 tahun.

Tabel 4.17 Rentang Usia Peserta Didik yang Mendapat Dari Bantuan Sarana

No	Kabupaten	Rentang usia peserta didik (dalam tahun)	
1	Kabupaten Bandung Barat	18	21
2	Kabupaten Semarang	24	35
3	Kabupaten Boyolali	17	36
4	Kabupaten Jombang	16	40

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Mayoritas kualifikasi pendidikan dari instruktur kursus tata busana/menjahit pada program bantuan sarana prasarana adalah lulusan SMA (Tabel 4.18.), kecuali di Kabupaten Semarang masih ada instruktur berpendidikan di bawah SMA. Instruktur di Kabupaten Jombang ada yang berpendidikan lulusan

D4/S1 dan D2/D3. Artinya sarana yang diusulkan agar dibantu pemerintah, dapat dikuasai oleh instruktur dengan mudah, seperti mesin jahit hihgspeed jarum 1 yang diterima oleh LKP Karya Utama, Kabupaten Boyolali.

Tabel 4.18 Peresentase rerata kualifikasi pendidikan instruktur kursus tata busana yang mendapat program bantuan sarana

No	Kualifikasi pendidikan	Peresentase rerata di daerah			
		Kab. Bandung Barat	Kab. Semarang	Kab. Boyolali	Kab. Jombang
1.	< SMA	0.0	11,1	0.0	0.0
2.	SMA	100.0	88.9	100.0	33.3
3.	D2/D3	0.0	0.0	0.0	33.3
4.	D4/S1	0.0	0.0	0.0	33.3

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Kondisi kualifikasi pendidik pada kursus tata busana tersebut masih di bawah ketentuan standar pembimbing kursus dan pelatihan bagi pembimbing/ instruktur dalam peningkatan penguasaan keilmuan atau keahlian harus kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan (Permendiknas Nomor 41, Tahun 2009). Dalam Permendiknas tersebut dikemukakan bahwa pembimbing untuk meningkatkan keterampilan praktis harus berkualifikasi akademik minimal

lulusan SMA/SMK/MA/Paket C. Kondisi pembimbing untuk keterampilan praktis ini yang banyak dimiliki LKP dan ditemukan dalam penelitian ini. Temuan tersebut didukung pula dari hasil Analisis Mutu Kursus (Sukmana, 2013) bahwa 46,83% pendidik kursus yang berkualifikasi SMA/SMK/MA/Paket C dan masih harus ditingkatkan lagi pendidikannya agar dapat meningkatkan mutu kursus yang ada di Indonesia.

b. Keterampilan tata kecantikan rambut

Data yang diperoleh dari lembaga kursus TKR ternyata instruktur berpendidikan di bawah SMA masih ada sekitar 33,3 persen dan yang lulusan D4/S1 ada 66,7 persen. Artinya, instruktur kursus TKR masih ada yang berpendidikan di bawah standar nasional yaitu minimum harus S1. Namun instruktur tersebut berpengalaman sangat memadai dan menguasai TKR.

Latar belakang pendidikan dari peserta didik TKR, ternyata 90 persen diantaranya lulusan SMA/Paket C dan 10 persen lulusan SMP/Paket B. Rentang usia peserta didik tersebut antara 16 tahun sampai 40 tahun. Artinya, mereka ini sudah dewasa dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, 95 persen peserta didik TKR berstatus pengangguran dan hanya 5 persen peserta didik yang sudah bekerja.

Berdasarkan ketentuan dari petunjuk teknis bantuan sarana prasarana bahwa LKP dapat memperoleh bantuan sarana prasarana dengan peserta didik yang berasal dari warga kurang mampu, belum bekerja (menganggur), dan putus sekolah. Dari data di

lapangan ditemukan bahwa persyaratan tersebut dipenuhi oleh LKP sebesar 98 persen peserta didik belum bekerja (menganggur), kecuali di Kabupaten Semarang ada 7 persen peserta didik berasal dari pelajar.

Menurut peserta didik, adanya bantuan sarana yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan peserta didik dapat mengenal dan menggunakan peralatan tata rambut. Disadari bahwa peralatan tata rambut cukup mahal dan dimungkinkan warga belajar belum tentu mampu membeli peralatan tersebut. Sebagai contoh di LKP Yenny, Kabupaten Jombang mendapat bantuan sarana *Chromo mist*, warga belajar dapat mempraktikkan penggunaan alat tersebut, sehingga ketika bekerja di salon kecantikan rambut peserta didik dapat menggunakan alat tersebut. *Ultrasonic Chromo Mist* bermanfaat antara lain untuk: memacu regenerasi sel-sel kulit, produksi jaringan, collagen kulit, mematikan bakteri, serta membuat kulit menjadi rileks dan segar.



Gambar 4.6 Mesin Chromomist pada keterampilan tata kecantikan rambut

Sarana mesin Chromomist pada keterampilan TKR yang dicontohkan dalam penelitian ini karena sarana sangat mendukung dalam keterampilan TKR. Bantuan sarana yang berasal dari pemerintah diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh LKP dan ketentuan petunjuk teknis (juknis) bantuan sarana dan prasarana pembelajaran kursus dan pelatihan, antara lain melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang meliputi: nama sarana yang diusulkan, spesifikasi, jumlah dan harga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pemberian bantuan sarana sesuai dengan kebutuhan dari LKP, bukan keinginan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

## **2. Manfaat Bantuan Sarana bagi Lembaga Kursus**

Program bantuan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan dengan tujuan untuk:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Menstimulasi lembaga kursus dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga lulusannya menjadi lebih kompeten.

Dari data di lapangan diperoleh hasil bahwa sarana yang diajukan dalam proposal, dapat dipenuhi oleh pemerintah karena telah memenuhi persyaratan dalam penerimaan bantuan sarana, yaitu sudah dinilai kinerjanya dibuktikan dengan hasil penilaian kinerjanya (akreditasi B), sudah beroperasi sekurang-kurangnya 5 tahun, memiliki pendidik yang kompetensinya sesuai

dengan bidangnya, dan memiliki bangunan atau ruangan untuk pembelajaran menjahit. Berikut beberapa jenis dan jumlah sarana yang dibantu dari pemerintah.

Tabel 4.19 Jenis dan jumlah sarana yang dibantu pemerintah

No	Jenis barang	Jumlah sarana yang dibantu pemerintah			
		Kab. Bandung Barat	Kab. Semarang	Kab. Boyolali	Kab. Jombang
1	Mesin jahit high speed jarum 1	5	5	4	3
2	Mesin jahit jarum 1 otomatis	1	0	4	0
3	Mesin portable/wolsoom	0	1	1	0
4	Mesin lubang kancing	0	1	0	1
5	Mesin zigzag	0	1	0	0
6	Mesin obras	1	1	1	2
7	Mesin potong	0	0	1	0
8	Overdeck	1			
9	Mesin neci	0	0	0	1

Catatan: Jenis sarana yang diberikan kepada LKP penerima bantuan sarana

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Bantuan sarana prasarana yang diberikan pemerintah kepada LKP tersebut sesuai dengan kebutuhan LKP. LKP tersebut mengajukan proposal bantuan sarana sesuai dengan ketentuan juknis sarana dan prasarana pembelajaran di kursus dan pelatihan. Asumsinya

dengan adanya bantuan sarana prasarana warga belajar dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat dan dapat dihasilkan lulusan yang baik serta mudah diterima di perusahaan atau menciptakan usaha baru. Prediksi ke depan mutu kursus dapat meningkat jika pemenuhan sarana prasarana dilengkapi oleh LKP.

Bagi pengelola LKP bantuan dari pemerintah dalam bentuk pemberian sarana sangat efektif dalam pembelajaran di LKP. Pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana dalam bentuk dana dan pengelola LKP dapat membeli sendiri sarana sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Dengan demikian, sarana tersebut sangat bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan LKP, seperti mesin jahit untuk kaos. Walaupun pada saat pengajuan proposal bantuan sarana digunakan untuk 5 peserta didik, namun peserta didik lainnya dapat menggunakan mesin jahit tersebut. Dengan demikian, peserta didik kelak jika bekerja di perusahaan dan menjumpai mesin serupa sudah dapat menggunakannya.

Bantuan sarana yang diterima dari pemerintah pusat kepada LKP di daerah sampel rata-rata sebesar Rp 37.500.000,00. Dalam petunjuk teknis (juknis) bantuan sarana ditentukan sebesar Rp 75.000.000,00. Perbedaan jumlah bantuan yang diterima dengan juknis dikarenakan dana bantuan yang seharusnya diterima satu LKP dibagi dua sehingga yang menerima dana bantuan sarana ada dua LKP. Ada pula LKP yang menerima bantuan sarana hanya Rp 35.000.000,00.

Hampir semua LKP membelikan alat/sarana pembelajaran sesuai dengan proposal yang diajukan. Namun, ketentuan dalam juknis bahwa LKP harus memberikan bantuan pembelajaran secara gratis kepada warga belajar dengan besaran 20 persen dari dana yang diterima, tidak dilaksanakan oleh hampir semua LKP

penerima bantuan sarana kecuali LKP Mei Li, Kabupaten Boyolali dan LKP Surya Intan, Kabupaten Semarang. LKP Mei Li dan LKP Surya Intan memberikan biaya kursus kepada enam peserta didik secara gratis. Alasan LKP tidak memberikan pembelajaran keterampilan secara gratis kepada warga belajar adalah dana bantuan sarana dan prasarana pembelajaran yang diterima sudah dimanfaatkan semuanya untuk membeli mesin jahit, mesin obras, dan mesin potong untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya pembelajaran praktek.

Berikut ditampilkan contoh LKP Karya Utama yang membelanjakan bantuan sarana pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Pemanfaatan Dana Bantuan Sarana Prasarana Pembelajaran Kursus dan Pelatihan Tahun 2016 LKP Karya Utama

No	Nama Barang	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Mesin Jahit High-speed Jarum 1	Type 5550, dynamo meja selempar fornika 1 set, kepala mesin highspeed	4	3.000.000	12.000.000
2.	Mesin Jahit Jarum 1 Otomatis	Type B.c.6.28D, dynamo servo, meja selempar formiks 1 set, kepala mesin otomatis	4	4.000.000	16.000.000
3.	Mesin Obras High Speed	Type Ym 747 dinamo, meja 1 set lengkap, kepala obras speed	1	3.750.000	3.750.000
4.	Mesin Jahit Wolsoom	Type Cm 500.1, meja 1 set dynamo, kepala mesin woll soom	1	2.250.000	2.250.000
5.	Mesin Potong	Typr RS 100, 1, 1 set mesin potong lengkap	1	1.000.000	1.000.000
	Jumlah		11		35.000.000

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Adanya penambahan sarana yang diterima oleh LKP Karya Utama tersebut sangat bermanfaat bagi warga belajar untuk mengenal mesin jahit selama mengikuti kursus dan pelatihan. Bagi LKP beban pemenuhan sarana yang harus disediakan oleh LKP dapat diatasi dengan adanya bantuan sarana tersebut. Bagi warga belajar selain mengenal sarana, mereka juga dapat menggunakan mesin tersebut pada saat bekerja di perusahaan atau konveksi.

## **C. Manfaat Program PKK, PKW, dan Magang**

### **1. Manfaat Program PKK**

Pada program PKK banyak peserta didik berasal dari lulusan SMA, kecuali di Kabupaten Boyolali sebagian besar peserta didiknya lulusan SMP/MTs/Paket B (Tabel 4.19.). Usia mereka mulai 15 tahun sampai 43 tahun (Tabel 4.20). Artinya, usia sampai 43 tahun mereka sudah dewasa dan hanya berpendidikan SMA atau SMP dan ini dapat dikatakan bahwa mereka juga termasuk yang putus sekolah. Selain itu, mereka belum memiliki pekerjaan tetap (menganggur), kecuali di Kabupaten Semarang ada 25 persen diantaranya berstatus dari pelajar. Kondisi ini sesuai dengan petunjuk teknik dalam program PKK bahwa peserta didik berasal dari putus sekolah atau lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan pendidikannya dan belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur.

Tabel 4.21 Peresentase kualifikasi pendidikan peserta didik pada program PKK

No	Kualifikasi pendidikan	Kab. Bandung Barat	Kab. Semarang	Kab. Boyolali	Kab. Jombang
1	Tidak sekolah	0.0	0.0	0.0	0.0
2	SD/MI/Paket A	0.0	0.0	4.2	0.0
3	SMP/MTs/Paket B	43.0	20.2	64.1	25.0
4	SMA/MA/Paket C	56.0	36.0	29.2	22.5
5	SMK/MAK	1.0	43.8	1.7	52.5
6	D1/D2/D3	0.0	0.0	0.8	0.0
7	D4/S1	0.0	0.0	0.0	0.0

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Tabel 4.22 Rentang usia peserta didik dari program PKK

No	Kabupaten	Rentang usia peserta didik (dalam tahun)	
1	Kabupaten Bandung Barat	16	40
2	Kabupaten Semarang	16	43
3	Kabupaten Boyolali	15	40
4	Kabupaten Jombang	17	40

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Sesuai dengan sasaran kursus dan pelatihan bahwa warga belajar adalah mereka yang berpendidikan SMA atau SMP dan juga yang putus sekolah masih memerlukan pendidikan tambahan dan berkelanjutan

yang bersifat khusus, serta masih memperdalam pendidikannya untuk meningkatkan penghasilan atau kemampuan kerjanya. Tentunya usia dari warga belajar tersebut sudah lebih tua jika dibandingkan dengan usia belajar dari peserta didik di satuan pendidikan formal. Sasaran kursus tersebut didukung oleh pendapat Nasution dalam Fuad Adman (Puslitjakdiknas, 2013), bahwa pelatihan adalah suatu proses belajar-mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang. Mereka mengikuti pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.

Dari data di lapangan, banyak LKP/LPK yang mendapat bantuan program PKK. Sesuai dengan tujuan program PKK bahwa peserta didik dibekali keterampilan sesuai kebutuhan DUDI dan dikembangkan etos kerjanya. Setelah menyelesaikan program, peserta didik dibantu dan dibimbing oleh lembaga penyelenggara program untuk mengakses lapangan kerja yang tersedia sampai mereka dapat bekerja pada DUDI.

LKP/LPK yang mendapat bantuan program PKK memberi pembelajaran menjahit sesuai dengan SKL. Namun, ada beberapa LKP seperti LKP Eka Mulya, Kabupaten Semarang menambah materi/menekankan pada pembelajaran mental peserta didik. Anak-anak/peserta didik harus siap mental ketika memasuki dunia kerja ataupun menjadi wirausaha. Penanaman mental ini dilakukan pada awal pembelajaran di LKP dan ketika mereka lulus. Alasan pengelola memberi penekanan mental adalah:

- a. Di Garmen yang ditekankan adalah target dalam bekerja. Ini yang harus disadari oleh peserta didik

- b. Garmen di Kabupaten Semarang merupakan industri ekspor sehingga produksi banyak yang dikejar oleh perusahaan ini, tidak hanya sebagai operator mesin melainkan juga berbagai skill
- c. Mendidik anak untuk menjadi peserta didik yang berkualitas

Pengelola LKP Kartika mengatakan bahwa tenaga lulusan dari lembaga kursus menjahit masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan garmen. Untuk memenuhi kuota atau kekurangan tenaga di DUDI maka LKP Kartika merekrut peserta didik dari luar Kabupaten Semarang, yaitu dari Makassar, Medan, dan Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya mereka ini berasal dari keluarga tidak mampu, lalu diikuti program PKK. Mereka tinggal di mess atau asrama milik LKP Kartika dengan gratis. Kebutuhan makan diambalkan dari bantuan program PKK.

Dari pandangan instruktur/pendidik kursus, lulusan LKP dapat lulus 100 persen dan dapat bekerja di perusahaan mitra kerja karena memiliki keterampilan yang mendukung pekerjaan di perusahaan garmen. Ditunjang pula, adanya pengusaha mendatangi LKP untuk membicarakan kurikulum dan pengembangan garmen. Sebagai contoh: di garmen dalam menjahit ada cara untuk menggunakan “*typing*” (dalam ada plastic) sehingga pada waktu dipakai hanya perlu dibersihkan (tidak perlu digosok).

Hasil diskusi ditemukan pula bahwa tidak semua alumni membuka usaha sendiri karena keterbatasan modal untuk membeli alat tata rambut. Ada alumni yang bekerja di salon dan ada pula yang bekerja secara **free lance**, yaitu bekerja sesuai dengan keinginan/permintaan konsumen untuk ditata rambutnya. Sebagai

contoh di Kabupaten Jombang, beberapa cara alumni untuk memperoleh konsumen melalui facebook, whatsapp, dan sejenisnya. Setiap hari rata-rata alumni memperoleh pendapatan sebesar Rp 300.000,00 sampai Rp 600.000,00.

Dari temuan di atas disimpulkan bahwa program PKK sangat membantu bagi lulusannya untuk dapat bekerja di perusahaan garmen. Para lulusan tersebut disalurkan oleh pengelola LKP/LPK ke perusahaan garmen. Bagi perusahaan garmen, adanya program PKK mempermudah perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja. Walau kebutuhan tenaga kerja dari lulusan LKP hanya memberikan **2 persen** dari kebutuhan garmen. Hal ini didukung dengan pendapat pengelola LKP Karya Abadi bahwa setiap minggu perusahaan garmen mendatangi LKP/LPK menjahit untuk mencari calon pekerja di garmen.

Untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan LKP maka pemerintah pusat memberikan bantuan kepada LKP berupa uang. Besar bantuan tergantung pada jumlah peserta didik yang ada di setiap lembaga. Tidak semua LKP mendapatkan bantuan, semua tergantung dari penilaian proposal yang diajukan ke pusat.

Pada umumnya program PKK diberikan LKP dengan jumlah peserta didik antara 40 sampai 50 orang dan mereka ini belajar keterampilan menjahit/ kecantikan di LKP secara gratis. Sebagai contoh LKP Kartika, Kabupaten Semarang dan LKP Karya Utama, Kabupaten Boyolali mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp115.000.000,00 untuk 50 peserta didik belajar tata busana secara gratis. Artinya, seorang peserta didik ikut belajar keterampilan menjahit dengan biaya Rp 2.300.000,00 per orang. Besaran biaya per orang tersebut sama untuk semua peserta didik yang

mendapat bantuan program PKK. Bantuan program PKK digunakan untuk manajemen (maksimal 20 persen), pembelajaran (minimal 60 persen), dan penyaluran/penempatan kerja (maksimal 20 persen). Dengan demikian, bantuan program PKK diprioritaskan untuk pembelajaran pengadaan modul pembelajaran, bahan praktik, biaya pemagangan/praktik kerja/orientasi kerja, honor instruktur/nara sumber, dan evaluasi hasil pembelajaran (penggunaan perangkat evaluasi dan pelaksanaan evaluasi).

## **2. Manfaat Program PKW**

Pada Tabel 4.23., nampak bahwa sebagian dari peserta didik yang mengikuti program PKW lulusan SMA/SMK. Namun masih ada peserta didik yang berpendidikan hanya lulusan SD di Kabupaten Boyolali (20 persen) dan Kabupaten Jombang (16.7 persen). Artinya, mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk biaya pendidikan dan juga dapat dikatakan mereka adalah siswa putus sekolah. Kenyataan ini dapat dilihat dari rentang usia dari peserta didik tersebut mulai dari usia 16 sampai 44 tahun (Tabel 4.23). Usia sampai 40 tahun dapat dikatakan usia dewasa. Selain rendahnya pendidikan dan putus sekolah, mereka belum mendapat pekerjaan tetap (menganggur), kecuali peserta didik di Kabupaten Semarang ada 15 persen diantaranya berstatus sebagai pelajar dan 5 persen lainnya sudah bekerja.

Tabel 4.23 Persentase kualifikasi pendidikan dari peserta didik pada program PKW

No.	Kualifikasi pendidikan	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1	Tidak sekolah	0.0	0.0	0.0
2	SD/MI/Paket A	0.0	20.0	16.7
3	SMP/MTs/Paket B	35.0	40.0	33.3
4	SMA/MA/Paket C	30.0	24.0	50.0
5	SMK/MAK	35.0	20.0	0.0

Catatan: LKP sampel Kabupaten Bandung Barat tidak mendapat program PKW

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jombang

Tabel 4.24 Rentang usia peserta didik dari program PKW

No	Kabupaten	Rentang usia peserta didik (dalam tahun)	
1	Kabupaten Bandung Barat	17	43
2	Kabupaten Semarang	16	44
3	Kabupaten Boyolali	18	40
4	Kabupaten Jombang	16	44

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Pada program PKW warga belajar yang mengikuti kursus dan pelatihan berpendidikan SMP/SMA dengan rentang usia 16 sampai 44 tahun. Mereka mengikuti kursus dan pelatihan dengan tujuan untuk menambah dan memperdalam pendidikannya untuk dapat mening-

katkan kemampuan dalam bekerja. Selama mengikuti program PKW warga belajar diberi materi kewirausahaan dengan tujuan agar setelah lulus dapat menciptakan usaha sendiri. Pembelajaran kewirausahaan tersebut memberikan beberapa aspek pendidikan, sesuai hasil penelitian Puslitjaknov (2010), yaitu sikap/perilaku/karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam kajian tersebut, dikemukakan bahwa aspek sikap/perilaku/karakter adalah aspek yang sangat penting bagi kesuksesan seorang entrepreneur/wirauasaha. Sikap gigih, pantang menyerah, dan sejenisnya tidak bisa dibentuk dalam jangka pendek. Kualitas sikap, perilaku, dan karakter unggul ini harus dibentuk sejak anak usia dini. Dampak pendidikan kewirausahaan terhadap warga belajar adalah anak dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang memadai, peserta didik akan mampu melihat peluang dan berani mengambil peluang tersebut, dan merealisasikannya menjadi suatu usaha bisnis. Hasil penelitian tersebut memberikan penguatan bagi lulusan kursus pada program PKW untuk berwirausaha atau menciptakan usaha sendiri (Gambar 4.3. Lulusan program PKW yang berwirausaha dan bekerja).

Dalam DKT ditemukan bahwa program PKW yang diikuti oleh peserta didik sangat bermanfaat dalam perolehan pendapatan dan peningkatan kesejahteraannya. Bagi lulusan program PKW yang belum bisa mandiri sebagai wirausaha maka ada beberapa pengelola LKP melakukan bantuan melalui: (i) Membentuk kelompok kerjasama antar lulusan/alumni dengan mendirikan usaha baru. Setelah setahun mereka telah memiliki modal sendiri maka mereka mendirikan usaha sendiri; (ii) Memberikan pinjaman modal (berupa uang atau alat) untuk para lulusannya mendirikan usaha

sendiri (sebagai penjahit). Pinjaman modal tersebut dikembalikan ketika alumni/lulusan memiliki uang dari keuntungan berwirausaha; (iii) Memberikan order/pekerjaan kepada alumni dan modalnya berasal dari pengelola LKP. Sebagai contoh, disajikan berikut ini.

- a. Pengelola LKP Modes Widya Indah, Kabupaten Jombang melakukan tiga bantuan, yaitu (i) Meminjamkan modal kepada lulusan yang belum memiliki modal usaha; (ii) Memberikan order kerjaan dimana pengelola memberikan pinjaman pembelian bahan (kain), setelah selesai jahitan baju, lulusan/alumni akan mengembalikan pinjaman tadi; dan (iii) Memberikan pinjaman modal pembelian alat mesin/bahan kepada alumni/lulusan yang bekerjasama dalam membuka usaha baru. Pinjaman modal akan dikembalikan ketika mereka telah memiliki keuntungan dari jahitan baju.
- b. Pengelola LKP Mei Li, Kabupaten Boyolali melakukan tiga bantuan, yaitu (i) Meminjamkan modal alat mesin jahit kepada lulusan program PKW. Mesin jahit tersebut akan dikembalikan setelah lulusan tersebut mampu membeli sendiri alat mesin jahit; (ii) Mendirikan pusat bisnis, yaitu LKP menerima para lulusannya untuk bekerja dalam jasa menjahit dan mencarikan order menjahit dari masyarakat dan perusahaan.

Menurut pengelola TKR, program PKW yang diterima dari pemerintah mengharuskan lulusan kursus TKR berwirausaha (menciptakan usaha baru/lapangan kerja baru), yaitu bisa mendirikan *home industry*, bekerja kelompok, atau membuka kios baru. Oleh karenanya pengelola TKR berusaha mempersiapkan peserta didiknya untuk berwirausaha, termasuk dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam keterampilan

TKR. Kendala yang dihadapi peserta didik adalah habisnya model yang dijadikan tempat praktek TKR. Peserta didik sendiri belum terampil dalam TKR. Oleh karenanya pengelola LKP ini melakukan berbagai cara dalam memberikan pembelajaran TKR. Sebagai contoh, untuk mendapatkan model potong rambut pihak LKP Topsy yang terdapat di Kabupaten Jombang menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah melalui **kegiatan bakti sosial**. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk melatih peserta kursus agar tidak grogi waktu memotong rambut dan meningkatkan mental peserta kursus. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan mulai pukul 9.00 sampai 12.00. Biasanya ada 120 anak yang dipotong rambutnya dalam satu hari itu. Awalnya salah satu guru di sekolah tersebut yang dipotong rambutnya dan siswa lainnya melihat guru yang sedang dipotong rambutnya dan mereka ingin juga dipotong. Setelah itu siswa sekolah dipotong rambutnya oleh peserta kursus. Ada 20 peserta kursus yang mengikuti bakti sosial ini sehingga satu peserta kursus akan memotong rambut dari 2 anak/siswa sekolah. Pihak LKP Topsy menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sana untuk mendapatkan model potong rambut bagi peserta didiknya.

Pengelola LKP TKR juga melakukan pembinaan bagi lulusannya yang masih kurang percaya diri dalam berwirausaha melalui kegiatan: (i) membuka usaha salon secara bersama bagi lulusan; dan (ii) di depan rumah usaha dari alumni dituliskan “potong rambut gratis”. Lulusan ini dibantu kawan lainnya (20 orang) untuk melakukan potong rambut. Dengan demikian, masyarakat di sekitar usaha baru ini mengetahui kalau di sekitar tempat tinggalnya ada/berdiri sebuah salon.

Melalui program PKW, para lulusan keterampilan TKR merasakan manfaatnya dengan berwirausaha sendiri melalui buka salon. Namun ~~ada~~ beberapa lulusan TKR yang bekerja secara *freelance* ketika kawannya membutuhkan tenaga untuk memotong atau menyanggul rambut.

Temuan di atas menunjukkan bahwa program PKW untuk keterampilan TKR sangat berdampak positif bagi lulusannya karena dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagi lulusan yang masih merasa kurang percaya diri dalam berusaha, mendapat binaan dan bimbingan dari pengelola dan instruktur LKP. Dengan demikian, tujuan program PKW seperti memberikan bekal untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dapat diwujudkan melalui keterampilan TKR.

Menurut pengelola LKP bantuan program PKW yang diberikan pemerintah pusat tergantung jumlah peserta didik yang dimiliki LKP dan sesuai dengan proposal yang diajukan dan disetujui. Jumlah peserta didik yang menerima bantuan PKW di setiap LKP antara 20 sampai 30 orang. Setiap peserta didik mendapat bantuan sebesar Rp2.500.000,00 dan jumlah ini lebih besar dari bantuan program PKK sebesar Rp2.300.000,00. Adapun bantuan dana program PKW ini digunakan untuk biaya manajemen (maksimal 15 persen), pembelajaran dan evaluasi (minimal 35 persen), dan bahan serta peralatan rintisan usaha peserta didik sesuai jenis usaha (50 persen) dari dana yang diterima. Sebagai contoh LKP Yanti, Kabupaten Bandung Barat memberikan modal kepada lulusan kursus dana modal usaha sebesar Rp 1.250.000,00 setiap orang (50 persen dari dana bantuan PKW sebesar Rp 2.500.000,00).

### 3. Manfaat Program Magang

Kualifikasi pendidikan dari peserta didik yang mendapat bantuan program magang bervariasi. Pendidikan SMP/MTs/Paket B dimiliki oleh peserta didik di Kabupaten Bandung (60 persen) dan Kabupaten Boyolali (56 persen), Sedangkan pendidikan SMA/MA/Paket C/SMK/MAK dimiliki oleh peserta didik dari Kabupaten Jombang (95 persen) dan Kabupaten Semarang (65 persen). Selain itu, usia peserta didik beragam mulai dari usia 17 sampai usia 37 (Tabel 4.25). Artinya, sampai usia 37 mereka ini sudah dewasa sehingga dengan pendidikan yang hanya lulusan SMA atau SMP, maka dapat dikatakan mereka ini termasuk dalam kondisi putus sekolah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa LKP telah memenuhi persyaratan dari ketentuan program magang bahwa peserta didik harus yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau dalam kondisi putus sekolah.

Tabel 4.25 Kualifikasi Pendidikan Peserta Didik pada Program Magang

No	Kualifikasi pendidikan	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Semarang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Jombang
1.	Tidak sekolah	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	SD/MI/Paket A	0.0	13.3	4.0	0.0
3.	SMP/MTs/Paket B	60.0	21.7	56.0	5.0
4.	SMA/MA/Paket C	40.0	23.3	8.0	15.0
5.	SMK/MAK	0.0	41.7	26.0	80.0
6.	D1/D2/D3	0.0	0.0	2.0	0.0
7.	D4/S1	0.0	0.0	4.0	0.0

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Tabel 4.26 Rentang Usia Peserta Didik dari Program Magang

No	Kabupaten	Rentang usia peserta didik (dalam tahun)	
1	Kabupaten Bandung Barat	18	33
2	Kabupaten Semarang	18	36
3	Kabupaten Boyolali	17	37
4	Kabupaten Jombang	18	25

Sumber: Data diolah dari LKP sampel di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Jombang

Warga belajar kursus dan pelatihan yang mendapat program magang mayoritas berpendidikan SMP/SMA/SMK dan berusia antara 17 sampai dengan 37 tahun. Warga belajar ini mengikuti magang untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dengan cara menerapkan secara langsung ke dunia kerja di perusahaan atau di instansi tertentu. Tujuan magang tersebut didukung oleh Sudjana (2000) bahwa dalam program magang terjadi interaksi pembelajaran terjadi melalui komunikasi antarpersonal secara langsung, antara pemberi dan penerima pesan. Bagi yang memberikan informasi adalah membelajarkan, sementara bagi yang menerima informasi adalah belajar. Pembelajaran magang dikatakan berhasil apabila permagang (pendidik) mampu menyadarkan pemagang (peserta didik/warga belajar) untuk mampu melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Lebih lanjut, Raharjo (1989) mengata-

kan bahwa unsur utama dari belajar dengan cara magang ini adalah meniru. Dengan demikian, warga belajar setelah mengikuti program magang dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pengalamannya. Hal ini sesuai dengan hasil program magang bahwa lulusan program magang bekerja di perusahaan (lihat Gambar 4.4. Lulusan dari program magang).

Sesuai dengan persyaratan yang diajukan ketika ingin memperoleh bantuan program magang, maka peserta didik harus yang belum bekerja (menganggur). Ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh LKP keterampilan tata busana bahwa hampir semua peserta didik yang mengikuti program magang belum bekerja, kecuali di Kabupaten Semarang ada 7 persen peserta didik berasal dari pelajar.

Menurut pengelola LKP/LPK yang mendapat bantuan program magang pada tahun 2016, besar dana yang diterima tergantung dari jumlah siswa. Dari data di lapangan ditemukan bahwa jumlah peserta didik yang mendapat bantuan magang bervariasi, yaitu ada LKP mendapat bantuan untuk 15 orang (LKP Karya Utama, Kabupaten Boyolali), ada LKP yang mendapat bantuan untuk 20 orang (LKP Bangun Karya, Kabupaten Jombang) atau 30 orang (LKP Kartika dan LKP Eka Mulya, Kabupaten Semarang). Setiap peserta didik yang mendapat bantuan magang menerima dana sebesar Rp2.500.000,00 dan dana ini lebih besar dibandingkan dana bantuan untuk program PKK hanya Rp 2.300.000,00. Pengelola LKP menjelaskan bahwa dana tersebut termasuk transpor peserta didik untuk magang di perusahaan sebesar Rp 300.000,00 per peserta selama satu bulan. Kursus menjahit dilakukan selama 2 bulan di LKP/LPK dan sebulan melakukan magang di perusahaan.

Menurut pengelola LKP bantuan program magang digunakan untuk biaya manajemen (maksimal 20 persen), proses pemagangan (maksimal 70 persen), dan evaluasi dan tindak lanjut (maksimal 10 persen). Ketentuan biaya tersebut sesuai dengan juknis program magang.

Menurut pengelola LKP Bangun Karya Kabupaten Jombang, bantuan program magang bermanfaat untuk menyiapkan peserta didik bekerja di perusahaan karena di LKP ini memiliki keterampilan menjahit *upper* sepatu. Keterampilan menjahit *upper* sepatu hanya dimiliki oleh dua LKP dan di kota/kabupaten lain belum ada keterampilan ini. Peserta didiknya disiapkan untuk dapat menjahit *upper* sepatu dan juga menjadi operator mesin *upper* sepatu. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan sepatu yang ada di Kabupaten Jombang, yang sebagian besar merupakan perusahaan modal asing. Selain itu, pengelola LKP Bangun Karya mengatakan ada tiga keuntungan dengan adanya program magang yaitu:

- a. Lulusan kursus langsung dapat bekerja di perusahaan karena telah magang sehingga dapat mengetahui dunia kerja dan bekerja sesuai kebutuhan perusahaan. Bagi lulusan LKP ini yang masih berusia 17 tahun disarankan masuk ke perusahaan *home industri* karena di dunia usaha dan industri (DUDI) minimal pegawai yang diterima harus berumur 18 tahun (sesuai aturan tenaga kerja).
- b. Perusahaan mendapat tenaga kerja yang lebih terampil karena tenaga kerja tersebut telah mengikuti magang diperusahaan.

- c. Adanya keterlibatan perusahaan yang dapat membimbing peserta didik. Selain bimbingan, peserta didik pun mendapat insentif dari perusahaan. Begitu pula dengan instruktur dari DUDI mendapat insentif dari perusahaan karena telah membimbing peserta didik. Kalau program regular tidak ada instruktur dari DUDI yang memberi bimbingan.

Bagi pengelola LKP/LPK lain, program magang ini sangat bermanfaat bagi pembelajaran di lembaga karena dengan keterbatasan sarana (mesin) yang dimiliki lembaga maka dengan program magang di perusahaan peserta didik dapat mempraktekan pengetahuan yang telah diperoleh di LKP/LPK. Bagi peserta didik program magang selain menambah pengetahuan, juga kesiapan peserta didik untuk lebih melatih bertanggung jawab/disiplin, mengetahui seluk beluk dunia kerja, dan mengetahui cara menyelesaikan masalah untuk tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagi lulusan yang mendapat bantuan dari program magang mengatakan bahwa setelah lulus mereka dapat langsung diterima di perusahaan tempat magang. Sebagai contoh, lulusan dari LKP Bangun Karya setelah mengikuti program magang langsung diterima di perusahaan PT Sumber Cira Persada, yang merupakan mitra kerja dari LKP Bangun Karya. Setelah diterima di perusahaan, alumni ini mengikuti training selama 3 bulan di perusahaan. Selama mengikuti *training* ini alumni diberi gaji sebesar Rp 800.000,00 untuk 2 minggu. Penerimaan gaji selalu diberikan pada tanggal 8 dan 23. Setelah selesai mengikuti masa *training*, maka alumni ini bekerja sebagai tenaga kerja dalam satu tim dengan mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp50.000,00 untuk 2 minggu. Pada saat ini (ketika diskusi berlangsung) kedudukan alumni ini sudah

menjadi mandor di perusahaan tersebut dengan gaji sebesar Rp1.100.000,00 per 2 minggu ditambah tunjangan Rp75.000,00 per minggu. Sebagai mandor, alumni ini membawahi 40 tenaga kerja.

Manfaat program magang bagi perusahaan sangat besar karena perusahaan tidak perlu mendidik atau mengadakan *training* berminggu-minggu bagi tenaga kerja yang baru. Namun perusahaan Garmen Karya Lokal yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat menerima lulusan kursus yang telah ikut magang tanpa proses seleksi. Mereka hanya diwawancara dan dites kecakapan penggunaan mesin. Artinya, lulusan dari program magang bisa langsung diterima bekerja di perusahaan tempat magang. Adakalanya lulusan masih diberi *training*/latihan selama 3-5 hari, dengan alasan perusahaan dapat dengan mudah menempatkan lulusan/pegawai baru tersebut di perusahaannya. Selain itu, selama program magang, perusahaan memberikan uang makan kepada peserta didik yang ikut magang. Bagi perusahaan program magang memberi dampak dari hasil produksi tanpa memberi gaji/upah kepada peserta magang.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa program magang sangat besar manfaatnya bagi pengelola LKP, peserta didik, dan perusahaan garmen. Pihak LKP/LPK dapat mendapatkan hubungan kerjasama dengan perusahaan, termasuk menambah kurikulum yang disesuaikan dengan dunia kerja. Pihak perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sudah siap bekerja dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melatih pegawai baru. Bagi peserta didik sendiri dapat menambah pengetahuan dan kesiapan mental dalam bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa bantuan dari pemerintah pusat melalui program PKK, PKW,

magang dan bantuan sarana sangat bermanfaat bagi peserta didik, pengelola LKP, dan perusahaan. Namun bantuan tersebut tidak hanya berdampak positif, melainkan juga ada dampak negatifnya. Menurut pengelolaan LKP dampak positif dari bantuan tersebut adalah:

- a. Bantuan pemerintah tersebut mengurangi pengangguran akibat putus sekolah. Dengan mengikuti program kursus, lulusan kursus dapat memiliki keterampilan dan bekerja atau berwirausaha sehingga mereka memiliki penghasilan untuk hidup.
- b. Bagi LKP yang mendapat bantuan sarana prasarana, dengan pembelian sarana yang sesuai dengan kebutuhan LKP, sehingga jenis dan jumlah sarana yang dimiliki oleh LKP menjadi bertambah. Bagi peserta didik dapat mengenal, mengetahui dan menggunakan cara pemakaian sarana/alat tersebut. Salah satu contoh di LKP TKR alat *chromomist* yang mahal, membuat peserta didik dapat menggunakan alat tersebut ketika bekerja di salon.

Dampak negatif yang dialami oleh LKP dan didukung dari pejabat dinas pendidikan yang menangani kursus adalah:

- a. Bantuan pemerintah membuat berkurangnya peserta didik jalur regular di LKP. Calon peserta didik mau mengikuti kursus jika gratis. LKP dapat memberikan kursus dan pelatihan karena mendapat bantuan dari pemerintah seperti program PKK, PKW, magang, dan sarana prasarana.
- b. Ada peserta didik yang “nakal” sudah mengikuti kursus di satu LKP, tetapi 2 minggu kemudian keluar dan pindah di tempat kursus lainnya. Hal ini

menyebabkan LKP yang ditinggalkan oleh peserta didik tersebut harus mencari penggantinya (peserta didik yang baru). Pencarian peserta didik baru harus dilakukan karena dalam program bantuan pemerintah jumlah peserta didik harus sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani. Dengan demikian, bantuan pemerintah tersebut dapat dikatakan menjadi ajang “perebutan” peserta didik.

Setiap LKP yang mendapatkan bantuan program dari pusat, peserta didiknya harus berbeda. Misal, dalam satu LKP mendapatkan dua bantuan yaitu bantuan PKK dan magang, maka peserta didik di program PKK dan magang tidak boleh sama, harus orang yang berbeda.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Kompetensi Lulusan**

###### **a. Penyelenggaraan Uji Kompetensi**

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai lulusan kursus dan pelatihan dari Program PKK, PKW, dan magang, setiap peserta didik harus mengikuti ujian lokal (diselenggarakan oleh LKP) dan nasional (diselenggarakan oleh LSK/LSP). Uji keterampilan yang meliputi ujian teori dan ujian praktik sesuai bidang keterampilan yang diselenggarakan oleh LKP yang bersangkutan. Pada umumnya setiap LKP menyelenggarakan satu uji keterampilan lokal, namun ada juga LKP yang menyelenggarakan uji lokal lebih dari satu jenis keterampilan, sesuai keterampilan yang diselenggarakan.

Untuk uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK dilaksanakan di TUK yang sudah ditentukan oleh LSK sesuai dengan jenis keterampilan yang diujikan. Setiap LSK membawahi beberapa TUK sesuai dengan jenis keterampilan.

Pada aturan/juknis bahwa biaya uji kompetensi sudah melekat pada bantuan pemerintah. Namun pada kenyataannya di lapangan setiap peserta didik yang akan ikut uji kompetensi dipungut biaya yang besarnya bervariasi antara Rp350.000,00 sampai Rp500.000,00.

Semua peserta didik LKP wajib mengikuti uji lokeal yang diselenggarakan oleh LKP yang bersangkutan, sedangkan untuk uji kompetensi/uji profesi, pada kenyataannya tidak semua peserta didik yang ikut kursus di LKP dapat mengikuti uji tersebut. Hal ini, disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh para peserta didik, karena mereka berasal dari keluarga ekonomi lemah.

Faktor pendukung keberhasilan uji lokal atau uji kompetensi antara lain karena keberadaan kurikulum yang sesuai KKNI, sarana prasarana yang memadai, dan tenaga pengajar yang kompeten/handal di bidang keterampilan yang diselenggarakan oleh LKP. Selain itu, adanya kerjasama dengan mitra sehingga peserta didik dapat mengetahui sarana yang ada di DUDI dan dapat menggunakannya.

## **b. Kompetensi Lulusan**

Uji lokeal dikatakan belum kompeten (BK)/tidak lulus (TL) jika nilai yang diperoleh  $\leq 70$ . Bagi peserta didik yang BK/TL dapat ikut uji lokal kembali sesuai dengan keagalannya. Jika gagal di teori maka uji kompetensinya hanya terkait teori. Bagi peserta yang gagal uji praktik maka uji lokalnya hanya di praktik-saja, teori tidak diikutkan kembali.

Uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK/LSP, seorang peserta didik dikatakan kompeten jika mendapatkan nilai  $\geq 80$  dan peserta didik yang mendapat nilai  $< 80$  dikatakan belum kompeten. Nilai terendah yang ditetapkan oleh LSK/LSP lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai terendah yang ditetapkan oleh LKP.

Hasil uji lokal yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa nilai uji kompetensi peserta

didik sampel hasilnya cukup memuaskan. Artinya, kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik sudah mumpuni untuk bekerja di DUDI maupun membuka usaha mandiri jika memiliki dana yang memadai. Hampir semua peserta didik yang magang atau ikut kursus di LKP yang bermitra dengan DUDI maka lulusannya diterima di DUDI tersebut.

## **2. Manfaat Program PKK, Program PKW, dan Program Magang**

### **a. Manfaat program PKK**

Program PKK yang digulirkan oleh Pemerintah sangat efektif bagi masyarakat. Pertama, bermanfaat bagi peserta didik yang hampir semuanya menganggur dan berpendidikan SMA/MA/SMK/Paket C (kecuali di Kabupaten Boyolali berpendidikan SMP/MTs/Paket B). Namun, mereka tidak melanjutkan pendidikannya, karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, manfaat bagi peserta didik tersebut adalah memberikan bekal keterampilan bekerja dan memperoleh penghasilan. Kedua, program PKK sangat membantu bagi lulusannya untuk dapat bekerja di mitra kerja LKP. Sebagian besar lulusan tersebut dapat direkrut oleh mitra kerja (garmen atau konveksi). Bagi mitra kerja, adanya program PKK mempermudah ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Walaupun demikian, berdasarkan hasil diskusi mitra kerja mengungkapkan bahwa lulusan LKP hanya dapat memenuhi 2 persen tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mitra kerja.

## **b. Manfaat program PKW**

Ada dua manfaat program PKW bagi masyarakat. Pertama, manfaat Program PKW bagi peserta didik yang hampir semuanya menganggur dan berpendidikan SMA/SMK (kecuali di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Jombang), karena mereka berasal dari keluarga tidak mampu adalah memperoleh keterampilan kerja mandiri untuk mendapatkan penghasilan. Hal tersebut dibuktikan sebagian besar lulusan program PKW dapat membuka usaha sendiri berupa usaha menjahit dan salon. Kedua, manfaat program PKW bagi LKP adalah menghasilkan lulusan yang dapat dipekerjakan dalam pusat bisnis yang dimiliki LKP tersebut. Selain itu, keuntungan dari pusat bisnis tersebut memberikan kontribusi dalam operasional LKP, seperti yang terjadi di Kabupaten Boyolali dan Jombang.

## **c. Manfaat program magang**

Ada dua manfaat program magang bagi masyarakat. Pertama, manfaat Program magang yang digulirkan oleh Pemerintah diberikan kepada masyarakat sangat efektif bagi peserta didik yang belum bekerja (menganggur) dan berpendidikan SMA/MA/Paket C (kecuali di Kabupaten Boyolali dan Bandung Barat), karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Peserta didik yang mengikuti program magang lulus dengan nilai cukup memuaskan (nilai 71-80) dan hampir semua lulusannya diterima bekerja di perusahaan tempat mereka mengikuti magang, walaupun harus mengikuti tes di perusahaan tersebut. Selain itu, peserta didik dapat mempelajari sarana yang dimiliki di LKP. Kedua, manfaat bagi LKP dengan kurang memadai sarana

yang dimilikinya dapat diatasi dengan memagangkan peserta didik tersebut di perusahaan yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

### **3. Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Sarana Prasarana**

Adanya bantuan sarana dan prasarana yang diperoleh LKP, membuat semua peserta didik dapat memanfaatkan bantuan sarana yang ada, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan jenis keterampilan yang diikutinya. Namun tidak semua sarana yang ada di LKP sesuai dengan sarana yang ada di DUDI.

Keuntungan bagi lembaga, yaitu bertambahnya jumlah sarana, sehingga dapat memenuhi persyaratan pendirian LKP. Pada umumnya pemanfaatan dana bantuan sarana prasarana digunakan oleh LKP untuk membeli mesin jahit *high speed* jarum 1 dan mesin obras. Kedua sarana tersebut merupakan prioritas utama untuk memenuhi kompetensi peserta didik agar sesuai dengan yang dibutuhkan di DUDI.

## **B. Opsi Kebijakan**

### **1. Koordinasi dan *sharing* anggaran bantuan sarana antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

- a. Kelebihan: Adanya *sharing* dana bantuan sarana antara pusat dan daerah. LKP dapat membeli sarana sesuai dengan yang ada di DUDI.
- b. Kelemahan: Kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda, membuat kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh daerah juga berbeda.

## **2. Pemanfaatan program PKK, magang, dan PKW**

### **a. Prgogram PKK dan Program Magang**

#### **Imbas pemanfaatan program pendidikan vokasi (PKK dan magang).**

- 1) Kelebihan: Dapat memperluas kebermanfaatan program PKK dan magang bagi sasaran program tersebut.
- 2) Kelemahan: belum adanya komitmen antara pengelola dan peserta didik untuk mengimbaskan keterampilan yang dimiliki peserta didik kepada sasaran yang belum dapat mengakses bantuan program tersebut.

### **b. Program PKW**

#### **1) Kerjasama permodalan dengan lembaga keuangan**

- a) Kelebihan : memperoleh akses dan mempermudah penambahan modal usaha bagi peserta didik.
- b) Kelemahan : perlu adanya jaminan pengembalian modal kepada lembaga keuangan

#### **2) Penguatan manajemen kewirausahaan dan pemasaran produk**

- a. Kelebihan: Lulusan LKP lebih memahami pengelolaan pemasarannya dan usaha mandiri
- b. Kelemahan: Masih kurangnya pembekalan materi pemasaran dan kewirausahaan serta ketersediaan instruktur yang berkompeten pada bidang tersebut.

## Daftar Pustaka

- Anonim, 2009. "Pengertian dan Komponen RPP", dalam <http://zizer.wordpress.com/2009/12/05/pengertian-dan-komponen-rpp> (10 Maret 2012).
- Ainunjarah, 2013. Standar Kompetensi Lulusan. <http://ainunjarah1214.blogspot.co.id/2013/12/standar-kompetensi-lulusan.html>, diunduh tanggal 2 Juli 2017
- Badan Pusat Statistik, 2016. Jumlah Pengangguran Indonesia. <https://tirto.id/jumlah-pengangguran-indonesia-2016-capai-702-juta-orang-bw8T>
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia, 2014. Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi. <http://lsp-lemdikpol.org/wp-content/uploads/2015/01/Peraturan-BNSP-No-5-Pedoman-206-Tahun-2014.pdf> diunduh tanggal 23 Maret 2018.
- BPKB Jayagiri, 1990. Pengantar Metode Belajar Pendidikan Luar Sekolah, Seri 1 s/d 12. Lembang: BPKB. <http://sistemoperasimobile.blogspot.co.id/2013/02/latar-belakang-dan-tujuan-magang.html>, diunduh tanggal 24 Juli 2017
- Bayu, Pradikto, 2017. Upaya Lembaga Kursus dan Pelatihan Dress Making Kota Cimahi dalam Meningkatkan Motivasi Berwirausaha. Dalam Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu, Vol 1 Nomor 1, Juli 2017.
- Budiani, Ni Wayan, 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, II (1), hlm. 49-57.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016. Tugas Pokok dan Fungsi. Jakarta.
- Does Ichwani Tri Wikanah, 2015. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Kualitas Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan Magistra Utama Kota Semarang. Semarang: *Journal of Nonformal Education*, 43-49.
- Fatmawati, 2016. TUK TKR Kimmi Gelar Uji Kompetensi Tata Kecantikan Rambut.  
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/10/31/tuk-tkr-kimmi-gelar-uji-kompetensi-tata-kecantikan-rambut>  
 diunduh 9 September 2017.
- Henny Oktavia, 2015. Dampak Program Kursus Menjahit Terhadap Sikap Wirausaha (Studi Pada Lkp Han's Klagaran Sendangrejo Minggir Sleman Yogyakarta). Yogyakarta: Skripsi Sarjana di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.  
[http://eprints.uny.ac.id/24699/1/Henny%20oktavia\\_08102241013.pdf](http://eprints.uny.ac.id/24699/1/Henny%20oktavia_08102241013.pdf) diunduh tanggal 26 Maret 2018.
- Hikkam, Rofiqi dan Sucahyono. TT. Peran Fasilitator Magang Batik Jonegoroan dalam Pemberdayaan Perempuan Ibu Rumah Tanggadi Pusat Magang Batik Mak Ni Desa Jono Puro Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.  
<http://docplayer.info/42013907-Peran-fasilitator-magang-batik-jonegoroan.html> diunduh tanggal 26 Maret 2018.
- Nurhandoko, Hilyar. 2009. Model Pembelajaran Kursus Komputer di Lembaga Kursus Adias Sindo Cerdas (ASC) (Studi Kasus Salah Satu Lembaga Kursus

Komputer di Jalan Sindoro No. 39 Kabupaten Pemalang). Semarang: Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

- Mulyasa, E., 2010. Implementasi *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <http://lp31.unikama.ac.id/id/2015/05/09/mengapa-ppl-berubah-menjadi-magang/>, diunduh tanggal 24 Juli 2017.
- Legiwati, Nanik, 2016. Pengaruh Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 3 Grati Satap Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI) Volume 10 No 2 (2016) 294-309*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70, Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41, Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursu 60s dan Pelatihan. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42, Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus. Jakarta

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26, Tahun 2016 tentang Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Permendikbud nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Dikbud bekerjasama dengan Kemitraan Australia Indonesia. 2010. Studi Cepat (*Rapid Assessment*) Pengkajian Pendidikan Kewirausahaan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Indonesia.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Nasional. 2013. Studi Evaluasi Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. Jakarta.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud, 2014. Pengkajian Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat. Jakarta: Puslitjak.
- Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2012-2015.
- Raharjo, Slamet, 1989. Disertasi, Magang Sebagai Salah Satu Sistem Belajar Asli, Bagaimana Aspek-Aspeknya Bekerja. Bandung: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Ricad, Neton Priago. 2013. Pengelolaan Lembaga Kursus (LPK) Chinju Dalam Menyelenggarakan Kursus Bahasa Korea Di Kota Bengkulu. Bengkulu: Skripsi di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.
- Samsul, Hadi. 2017. Kesiapan Uji Kompetensi Program Otomotif di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Yogyakarta: *Jurnal Tanaman Vokasi* hlm 43-54.

- Suharyadi, 2015. Ini 3 Masalah Yang Bakal Dihadapi Republik Indonesia Saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dimulai.  
<http://finance.detik.com/read/2015/12/30/213011/3107895/4/ini-3-masalah-yang-bakal-dihadapi-ri-saat-mea-dimulai> diunduh tanggal 18 Februari 2016.
- Sukmana, Cucu dan Dian Lestari, 2013 Analisis Mutu Kursus. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud.
- Teori Efektivitas Menurut Pendapat Para Pakar Terpercaya, 2015. dalam <http://www.feedsia.com/2015/08/teori-efektifitas-menurut-pendapat-para.html#>
- Sudjana, D. 2000. Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : Nusantara Press.  
<http://tempatmagangjogja.com/pengertian-magang-dan-beberapa-manfaat-yang-bisa-didapatkan/>, diunduh tanggal 24 Juli 2017.  
<https://navitajaya.wordpress.com/>, diunduh tanggal 11 Juli 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional ok  
<lsktb.files.wordpress.com/2016/04/sosialisasi-mei-2016.pdf>.





# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KURSUS

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk: (1) Mengkaji penyelenggaraan uji kompetensi dan kompetensi lulusan; (2) Mengkaji efektivitas penyelenggaraan program PKK, PKW, dan program magang; (3) Mengkaji efektivitas pemanfaatan bantuan sarana prasarana di lembaga kursus dan pelatihan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena menyajikan gambaran lengkap secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

Hasil kajian ini adalah: (1) Faktor pendukung keberhasilan uji lokal atau uji kompetensi antara lain karena keberadaan kurikulum yang sesuai KKN1, sarana prasarana yang memadai, dan tenaga pengajar yang kompeten/handal di bidang keterampilan yang diselenggarakan oleh LKP; (2) Berdasarkan hasil uji lokal yang diperoleh dari lapangan, menunjukkan bahwa nilai uji kompetensi peserta didik sampel hasilnya cukup memuaskan; (3) Program PKK sangat membantu bagi lulusannya untuk dapat bekerja di mitra kerja LKP; (4) Program PKW sangat bermanfaat bagi peserta didik dan bermanfaat bagi LKP karena menghasilkan lulusan yang dapat dipekerjakan dalam pusat bisnis yang dimiliki LKP tersebut; (5) Program magang sangat efektif bagi peserta didik dan bermanfaat bagi LKP; (6) Adanya bantuan sarana dan prasarana yang diperoleh LKP, membuat semua peserta didik dapat memanfaatkan bantuan sarana yang ada, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan jenis keterampilan yang diikutinya.

Kajian ini memberikan saran kebijakan yaitu: (1) Koordinasi dan sharing anggaran bantuan sarana antara pemerintah pusat dan daerah; (2) Pemanfaatan: (a) Program PKK dan Program Magang: Imbas pemanfaatan program pendidikan vokasi (PKK dan magang), (b) Program PKW: (i) Kerja sama permodalan dengan lembaga keuangan, (ii) Penguatan manajemen kewirausahaan dan pemasaran produk.

